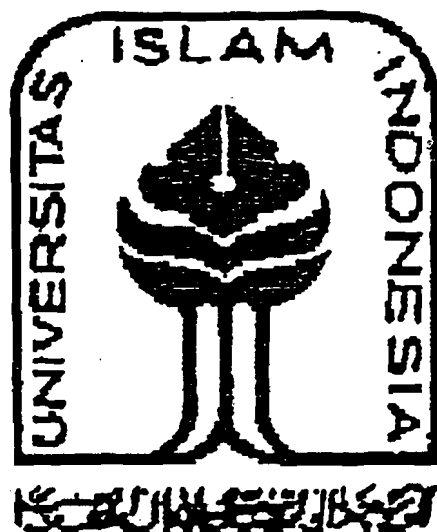

TUGAS AKHIR

POS PEMERIKSAAN LINTAS BATAS ENTIKONG

PERBATASAN KALIMANTAN BARAT SARAWAK

**LANDASAN KONSEPTUAL
PERENCANAAN DAN PERANCANGAN**



Oleh :

Wahyuni Kartikasari

**90 340 003
900051013116120003**

**JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

1996

POS PEMERIKSAAN LINTAS BATAS ENTIKONG

PERBATASAN KALIMANTAN BARAT SARAWAK

**LANDASAN KONSEPTUAL
PERENCANAAN DAN PERANCANGAN**

**Tugas akhir diajukan kepada:
Jurusan Teknik Arsitektur
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Universitas Islam Indonesia
untuk memenuhi sebagian syarat dalam
mencapai gelar Sarjana Teknik Arsitektur**

TUGAS AKHIR

Oleh :

Wahyuni Kartikasari

**9 0 3 4 0 0 0 3
900051013116120003**

**JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
1996**

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR
POS PEMERIKSAAN LINTAS BATAS ENTIKONG
PERBATASAN KALIMANTAN BARAT SARAWAK

LANDASAN KONSEPTUAL
PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Oleh :

Wahyuni Kartikasari

90 340 003
900051013116120003

Yogyakarta, Maret 1996

Menyetujui,

Pembimbing I



(Ir. Hadi Setiyawan)

Pembimbing II



(Ir. Ahmad Saifudin, M.MT)

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Arsitektur FTSP UII



(Ir. Wiryono Raharjo, M.Arch)

Orang-orang terkasih yang menyayangiku apa adanya

Keponakanku: Okky, Asthd, Eto,

Kakakku Kak Long Zoi, Mas Mamad, Bangah Yadi, Kak Afi

Si kecil Nadia dan Mas Toni,

Ayah dan mama,

Stipsi ini kupersembahkan bagi:

“Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika diantaramu ada seratus orang yang sabar niscaya mereka akan mengalahkan dua ratus orang, dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seijin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar”. (Al-Anfaal 66)

PRAKATA

Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillahirabbilalamain, kata suci ini yang dapat penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan hidayahNya pulalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini ditulis sebagai landasan konseptual perancangan yang merupakan rangkaian dari tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang telah membantu, baik secara moril maupun materil, dari awal hingga tersusunnya skripsi ini.

Ucapan terimakasih ini khususnya penulis sampaikan kepada:

1. Ir. Hadi Setiyawan, Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan saran-saran.
2. Ir. A. Saifudin M, MT, Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, ilmu dan saran-saran pula.
3. Ir. H. Munichy BE, M. Arch, Ir. Ilya FM, Ir. Iftironi, atas diskusi, dan buku-buku literturnya.
4. Staf Bappeda Daerah Tk. I Propinsi Kalimantan Barat.
5. Staf Pos Pemeriksaan Pelintas Batas Entikong.

6. Ayah dan mama dengan restu, doa siang dan malam, Nadia dan Mas Toni atas pengertiannya , kakak-kakak dan keluarga atas doa, dorongan moril dan materil.
7. Iyan, Tatang, Budi, Dodi, Dewi dan Oji: teman-teman satu bimbingan, Anonk, atas diskusi, olok-olok, canda-tawa, dukungan dan perhatian yang menguatkan penulis disaat-saat sulit, suatu kebersamaan yang manis.
8. Teman-teman dari Kalimantan Barat dan asrama Kalimantan barat, atas buku-buku literatur dan informasinya, teman-teman satu angkatan dan adik-adik angkatan, dengan sapaan yang membuat panik ``sudah sampai bab berapa ?'', mengingatkan penulis akan pekerjaan yang masih menumpuk.
9. Mbak-mbak, Mas-mas di perpustakaan, studio dan bagian pengumpulan tugas, atas bantuannya.
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan disini satu persatu, atas bantuannya secara langsung maupun tidak, berupa bantuan moril maupun materil.

Akhir kata, semoga penulisan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua.

Wassalamualaikum wr. wb.

Siliran, Maret 1996

- Penulis -

ABSTRAKSI

Syarat-syarat berdirinya suatu negara antara lain mempunyai penduduk, wilayah, dan kedaulatan. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia terdiri dari lautan dan daratan. Maka batas-batas wilayah yang dimiliki, baik itu antar propinsi maupun batas wilayah dengan negara lain, berbentuk perbatasan laut dan perbatasan darat.

Salah satu wilayah Indonesia yang berbentuk perbatasan darat, yaitu perbatasan antar negara adalah yang terletak di Kalimantan Barat dan Sarawak (salah satu negara bagian Malaysia). Di perbatasan ini terdapat pintu-pintu penghubung yang menghubungkan semua kegiatan kerjasama antara negara Indonesia dan Malaysia khususnya, serta penghubung secara tidak langsung antara negara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia.

Pintu penghubung di Kalimantan Barat dan Sarawak ini disebut sebagai Pos Pemeriksaan Lintas Batas (Indonesia) yang terletak di Entikong, dan Pos Imigrasi (Sarawak) yang terletak di Tebedu. Pos-pos ini berfungsi sebagai pos pemeriksaan keluar-masuknya orang, barang dan kendaraan yang melintas antar negara tersebut, atau yang dikenal dengan istilah CIQ (Custom, Immigration and Quarantine).

Sebagai pintu terdepan yang berfungsi sebagai penyaring segala hal yang akan masuk ke negara, maka fasilitas-fasilitas pemeriksaan di pos pemeriksaan ini adalah hal yang paling penting. Selain itu fasilitas-fasilitas penunjang juga diperlukan sehubungan dengan situasi, kondisi dan kepentingan masing-masing negara.

Pelayanan yang cepat, dan lancar adalah hal yang paling mendasar di PPLB. Maka hal-hal yang tidak perlu atau tidak sesuai yang dapat mengganggu jalannya proses pemeriksaan diupayakan diminimalisasikan. Banyak cara untuk mengatasi hal tersebut. Dari sudut pandang arsitektur, program peruangan yang berkaitan dengan sirkulasi dapat turut menentukan kegiatan yang berlangsung didalamnya. Maka perencanaan dan perancangan yang tepat akan sangat mendukung berjalannya proses.

DAFTAR ISI

BAB	HALAMAN
LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAKSI.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
I. PENDAHULUAN	
A. LATARBELAKANG.....	1
1. Perkembangan di Kalimantan dan Dampaknya pada PPLB..	2
2. Kondisi di PPLB.....	4
3. Kondisi Masyarakat Kawasan Perbatasan.....	6
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN DAN SASARAN.....	7
D. LINGKUP PEMBAHASAN.....	8
E. METODE PEMBAHASAN.....	8
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	9
II. POS PEMERIKSAAN LINTAS BATAS	
A. PENGERTIAN.....	10
B. TINJAUAN UMUM.....	10
1. Tugas dan Fungsi PPLB.....	10
2. Prosedur Pemeriksaan Lalulintas Orang, Barang, Kendaraan.....	15
3. Latarbelakang Berdirinya PPLB.....	15
4. Pelaku PPLB.....	18

C. BENTUK DAN FUNGSI.....	19
D. ENVIRONMENTAL DESIGN.....	21
E. TINJAUAN KHUSUS.....	23
1. Lokasi.....	23
2. Karakteristik Fisik Dasar.....	23
3. Perkembangan PPLB.....	24
4. Kebijakan Pemerintah.....	24
5. Kondisi PPLB.....	25
III : ANALISA KEBUTUHAN FASILITAS DAN PENATAAN RUANG-RUANG DI PPLB	
A. DASAR PEMIKIRAN.....	32
B. PERKEMBANGAN FUNGSI PPLB.....	32
1. Analisa Pertambahan Jumlah Pelintas Batas dan Petugas PPLB.....	32
2. Analisa Kebutuhan Fasilitas.....	37
C. PENATAAN RUANG-RUANG PPLB.....	43
1. Lokasi dan Site.....	43
2. Pengelompokan Ruang Berdasar Jenis Kegiatan.....	44
3. Gubahan Massa.....	46
4. Pola Ruang Luar.....	48
5. Pola Ruang Dalam.....	49
6. Penzoningan.....	52
D. BANGUNAN PPLB.....	53
1. Penampilan Bangunan.....	53
2. Faktor Fisik Jalur Pergerakan.....	54
3. Besaran Ruang.....	58
4. Pola Hubungan dan Organisasi Ruang.....	66
5. Persyaratan Ruang.....	72
IV : KESIMPULAN	74
V : KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN	
A. KONSEP PERENCANAAN.....	76
1. Lokasi dan Site.....	76

2. Penzoningan.....	77
3. Sirkulasi dan Pencapaian.....	78
B. KONSEP PERANCANGAN:	79
1. Penampilan Bangunan.....	79
2. Kebutuhan Ruang.....	81
3. Hubungan Ruang.....	82
4. Pengelompokan Ruang.....	83
5. Persyaratan Ruang.....	83
6. Organisasi Ruang.....	88
7. Besaran Ruang.....	79
8. Pola Vegetasi.....	90
9. Konsep Dasar Teknis.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
1.1. Skema Perolehan Kegiatan Berdasarkan Penggunaan Waktu..	4
1.2. Pelintas Batas Menunggu Selesainya Proses Pemeriksaan Pelintas Batas Lainnya.....	5
1.3. Skema Metode Pembahasan.....	8
2.1. Struktur Organisasi PPLB.....	14
2.2. Skema Prosedur Pemeriksaan.....	15
2.3. Para Pengangkut Barang Sedang Menunggu Pekerjaan.....	27
2.4. Memberi Pekerjaan Untuk Mengangkut Barang.....	27
2.5. Para Pengangkut Barang Menggunakan Jalur Sirkulasi Kendaraan (Bis).....	28
2.6. Daerah Potensial Rawan Penumpukan Kemaotetan.....	29
2.7. Kantor Instansi Penunjang Kegiatan yang Berada di Deretan Kegiatan Utama.....	30
2.8. Skema Penzoningan di Area PPLB.....	30
3.1. Lokasi PPLB Terhadap Jalan Utama Kalimantan Barat Sarawak.....	44
3.2. Skema Kegiatan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia...	48
3.3. Pola Ruang Dalam Bangunan Kegiatan Utama.....	49
3.4. Skema Kegiatan Laboratorium dan Pajak.....	50
3.5. Skema Kegiatan Tambahan.....	51
3.6. Analisa Zone.....	52
3.7. Alternatif Sirkulasi Pemeriksaan Kendaraan (bis)....	54
3.8. Alternatif Sirkulasi Pemeriksaan Kendaraan (kecil)..	55
3.9. Sirkulasi Orang.....	56
3.10. Pemisahan Sirkulasi Pelintas Batas.....	58
3.11. Percabangan Pencapaian.....	57
3.12. Pemisahan Jalur Pedestrian dan Kendaraan.....	58
3.13. Susunan Unit Meja Kerja.....	58
3.14. Meja Pemeriksaan Pelintas Batas.....	59
3.15. R. Koordinator PPLB.....	59

3.16. Alternatif Susunan Kursi R. Tunggu Pengantar/Penjemput Orang.....	61
3.17. R. Tunggu Kendaraan Pribadi.....	62
3.18. Halte Minibus.....	62
3.19. R. Parkir Bis Pelintas Batas.....	63
3.20. Pantry Kantin.....	63
3.21. Toko Souvenir.....	64
3.22. R. Wudhu.....	65
3.23. Matrik Hubungan Ruang dan Skema Organisasi Ruang Proses Masuk Wilayah Indonesia.....	66
3.24. Matrik Hubungan Ruang dan Skema Organisasi Ruang Proses Keluar Wilayah Indonesia.....	67
3.25. Matrik Hubungan Ruang dan Skema Organisasi Ruang Laboratorium.....	68
3.26. Matrik Hubungan Ruang dan Skema Organisasi Ruang Pajak.	69
3.27. Matrik Hubungan Ruang dan Skema Organisasi Ruang Pengantar/ penjemput.....	69
3.28. Matrik Hubungan Ruang dan Skema Organisasi Ruang Tunggu Pengangkut Barang.....	70
3.29. Matrik Hubungan Ruang dan Skema Organisasi Ruang Kantin.	70
3.30. Matrik Hubungan Ruang dan Skema Organisasi Ruang Mushala.	71
3.31. Matrik Hubungan Ruang dan Skema Organisasi Ruang Warpostel.....	71
3.32. Matrik Hubungan Ruang dan Skema Organisasi Ruang-ruang Lain.....	72
5.1. Konsep Lokasi dan Site PPLB.....	76
5.2. Konsep Penzoningan di PPLB.....	77
5.3. Pemisahan Sirkulasi Pelintas Batas.....	78
5.4. Sirkulasi Utama.....	78
5.5. Pemisahan Jalur Pedestrian dan Kendaraan.....	79
5.6. Bentuk-bentuk Arsitektur Kalimantan Barat.....	80
5.7. Matriks Hubungan Ruang.....	82
5.8. Persyaratan Ruang Karantina SDA.....	84
5.9. Persyaratan Ruang Sirkulasi Pengangkut Barang dan Pe- lintas Batas.....	84

5.10.Persyaratan Ruang Laboratorium.....	85
5.11.Persyaratan Ruang Kantor Koordinator.....	85
5.12.Persyaratan Ruang Rapat Koordinasi.....	86
5.13.Persyaratan Ruang Kantin.....	88
5.14.Skema Organisasi Ruang Bangunan Kegiatan Utama.....	88
5.15.Skema Organisasi Ruang Bangunan Kegiatan penunjang.....	88
5.16.Skema Organisasi Ruang Bangunan Kegiatan Tambahan.....	88
5.17.Pola Vegetasi.....	90

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1.1. Perkembangan Keluar Masuk Paspor Kalbar-Sarawak.....	3
1.2. Perkembangan Keluar Masuk Kendaraan Sarawak-Kalbar....	3
1.3. Perkembangan Keluar Masuk PLB Kalbar-Sarawak.....	7
3.1. Hubungan Antara Manajemen, Kegiatan Pelaku dan Ruang..	39
3.2. Kebutuhan Ruang untuk Mewadahi Kegiatan non Formal Di PPLB.....	41
3.3. Perbandingan Kebutuhan Ruang dan Fasilitas yang Telah Ada di PPLB.....	42
3.4. Persyaratan Ruang yang Dapat Memenuhi Tuntutan Jenis Ruang.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta Daerah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak
2. Tabel Hubungan antara Sistem Lingkungan (Environment System), Sistem Bangunan (Building System), dan Sistem Manusia (Human System).

BAB I PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Indonesia adalah negara kepulauan, yang secara geografis tersebar diantara 6° Lintang Utara sampai dengan 11° Lintang Selatan dan 95° Bujur Timur sampai 141° Bujur Timur. Sesuai dengan keadaan geografis tersebut, maka perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga terdiri dari perbatasan laut dan perbatasan di daratan.

Salah satu bagian (daerah) Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah Propinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Sarawak, salah satu negara bagian Malaysia.

Sebagaimana lazimnya setiap daerah perbatasan, maka adanya pintu-pintu yang menghubungkan kepentingan kedua negara adalah merupakan sesuatu yang wajar.

Entikong adalah salah satu tempat di Propinsi Kalimantan Barat yang merupakan pintu gerbang dalam menghubungkan wilayah Indonesia dengan Malaysia. Sejalan dengan hal tersebut di Entikong ini telah didirikan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB). Pembangunan dan penyediaan PPLB di Entikong dan Tebedu (Sarawak) merupakan pelaksanaan dari kesepakatan yang diambil pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam pertemuan General Border Committee (GBC) yang dilaksanakan di Medan tahun 1984.

Dalam strategi dan rencana tata ruang kawasan perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak, disebutkan adanya Kawasan Penyangga Perba-

~~tasian Kalimantan Barat-Sarawak, yang dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap arus barang dan manusia yang keluar masuk Indonesia, untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perbatasan adalah kawasan yang berada sepanjang perbatasan sejauh-jauhnya 4 km dari garis perbatasan¹. Entikong, desa di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, terletak 3 km dari garis perbatasan (Gb. Lampiran 1).~~

1. PERKEMBANGAN DI KALIMANTAN DAN DAMPAKNYA PADA PPLB

Jika pada masa dahulu pos lintas batas Entikong cenderung hanya berfungsi sebagai pintu keluar-masuk bagi pelintas batas tradisional penduduk kawasan perbatasan, maka sekarang PPLB Entikong juga berfungsi sebagai pintu keluar-masuk (legal exit and entry point) bagi pelintas batas non tradisional, dan sebagai pintu gerbang lalu lintas kendaraan antar negara (internasional)². Dengan pengembangan fungsi ini berarti akan ada pula pengembangan prosedur pemeriksaan di PPLB tersebut, maka fasilitas pemeriksaan PPLB juga akan bertambah. Selain itu jenis kegiatan dan jenis pelintas batas juga akan bertambah, karena fungsinya yang lebih luas.

Tabel 1.1 dibawah ini menunjukkan peningkatan jumlah pelintas batas yang melewati PPLB berdasarkan penggunaan paspor, berarti menunjukkan adanya peningkatan pengguna PPLB oleh penduduk di luar kawasan perbatasan.

¹ Permda Tk I Propinsi Kalimantan Barat, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat, Rencana (Maret 1994), p. 3.6.

² PermdaTk I Propinsi Kalimantan Barat, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat, Fakta dan Analisis (Januari 1994), p. 3.30.

Tabel 1.1
Perkembangan Keluar Masuk Paspor Kalbar-Sarawak

No	Tahun	Dari Kalbar		Dari Sarawak	
		Keluar	Masuk	Keluar	Masuk
1	1989	4139	2645	4742	6142
2	1990	18334	12805	11629	11911
3	1991	25206	17806	17223	17426
4	1992	35123	21225	23072	24156
5	1993	38874	23385	28967	29024
6	1994	43992	32185	17529	17238

Sumber : Bappeda Tk I Kalimantan Barat, 1995

Arus kendaraan yang melewati PPLB juga menunjukkan peningkatan jumlah dari tahun ke tahun sebagaimana tertera pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan Keluar Masuk Kendaraan Sarawak-Kalbar

No	Tahun	Ke Sarawak	Ke Kalbar
1	1989	189	258
2	1990	1439	1799
3	1991	1605	3149
4	1992	1945	5255
5	1993	1756	5830
6	1994	1383	3377

Sumber : Bappeda Tk I Kalimantan Barat, 1995

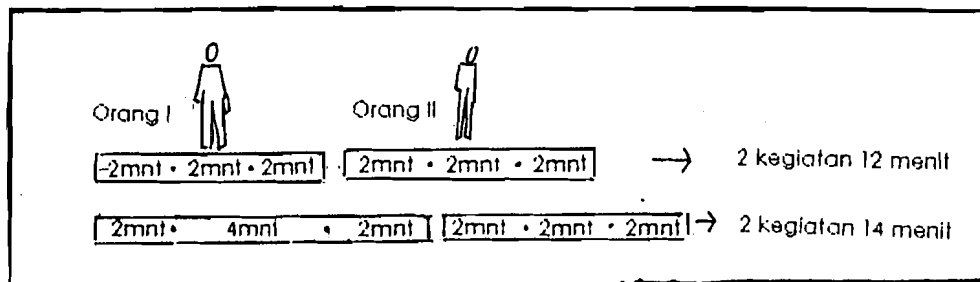
Pengembangan hubungan darat antara Sarawak, Kalimantan Barat dan Brunei Darussalam akan mewujudkan Pan Borneo Kalimantan Highway yang akan menghubungkan propinsi-propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat dalam jalinan Jalan Lintas Kalimantan dengan Sarawak-Brunei Darussalam sampai ke kota Kinibalu, Sabah³. Ini berarti jalinan jalan tersebut merupakan jalan utama. Sehingga kegiatan yang mempunyai hubungan dengan Sarawak dan Kalimantan Barat, atau daerah lainnya akan menggunakan

³ Kata Sambutan Gubernur Kepala Daerah Tk I Kalimantan Barat dalam Peresmian Pembukaan Pertemuan ke 11 KK/JKK SOSEK MALINDO.

~~jalan tersebut. Arus pelintas batas di PPLB yang terletak di jalur jalan tersebut akan mengalami peningkatan pula.~~

2. KONDISI PPLB

Jika penduduk suatu negara akan mengadakan pergerakan terutama untuk masuk atau keluar negara, ia harus menjalani serangkaian prosedur pemeriksaan keimigrasian. Idealnya, untuk menjalani rangkaian pemeriksaan tersebut diperlukan waktu 10-15 menit⁴. Yang teramati pada PPLB Entikong, pemeriksaan berjalan antara 25-30 menit. Pengunduran waktu seperti ini tak akan berdampak besar bila jumlah pelintas batas yang diperiksa sedikit. Namun akan lain halnya bila terjadi peningkatan jumlah pelintas batas. Kecepatan pelayanan/pemeriksaan yang tidak sesuai dengan penambahan jumlah pelintas batas yang akan diperiksa, ataupun ada perbedaan waktu yang sangat besar pada satu bagian dengan bagian lainnya, akan menyebabkan penumpukan dan kemacetan. Padahal prosedur pemeriksaan yang cepat, dan nyaman adalah hal yang paling penting. Gambar dibawah ini memperlihatkan jumlah kegiatan yang diperoleh antara penggunaan waktu yang sama pada masing-masing kegiatan dengan adanya perbedaan penggunaan waktu pada salah satu kegiatan.



Gb. 1.1. Skema perolehan kegiatan berdasarkan penggunaan waktu

⁴ Hasil wawancara dengan petugas imigrasi PPLB Entikong dan Koordinator PPLB

Gambar 1.2 berikut memperlihatkan sebagian kecil pelintas batas orang yang telah melalui proses pemeriksaan dan menunggu pelintas batas lainnya.



Gb. 1.2. Pelintas batas menunggu selesainya proses pemeriksaan pelintas batas lainnya

Terlebih lagi posisi bangunan utama PPLB, yaitu bagian pemeriksaan, berseberangan langsung dengan Pos Imigresen Malaysia. Bila terjadi kemacetan pada salah satu pos, antrian yang panjang akan berimbas pada pos lainnya.

~~Sesuai dengan fungsinya sebagai Pos Pemeriksaan Lintas Batas, ada suatu alur proses pemeriksaan yang terjadi. Jika berbicara ten-~~

tang alur, maka tercermin adanya tata urutan dan tata aturan yang menghendaki ketertetapan dan kelancaran. Sirkulasi adalah hal paling mendasar dalam kelancaran. Sirkulasi yang baik, dalam arti sesuai jalur tanpa terjadinya crossing, akan mendukung terciptanya kelancaran.

Crossing sirkulasi terjadi di bangunan utama PPLB adalah akibat adanya percampuran dua jenis kegiatan dalam satu zone. Alur kegiatan pemeriksaan terputus oleh adanya kegiatan sampingan, seperti penukaran uang, dengan demikian pengelompokan ruang tercampur antara kelompok ruang untuk kegiatan utama dengan kelompok ruang untuk kegiatan tambahan.

3. KONDISI MASYARAKAT KAWASAN PERBATASAN

Pada dasarnya penduduk Propinsi Kalimantan Barat sebagai wilayah yang memiliki garis batas daratan dengan Sarawak (Malaysia Timur) mempunyai pola hubungan etnis yang erat antar kedua negara.

Hal ini akan membawa implikasi pada pola hubungan keluarga atau yang merasa berasal dari rumpun etnis/suku yang sama. Bahkan sudah menjadi hal yang lumrah apabila penduduk perbatasan Kalimantan Barat maupun Sarawak sering keluar-masuk kawasan perbatasan untuk berbagai keperluan, seperti mengadakan kunjungan keluarga, menghadiri upacara tradisional, dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Untuk itulah bagi penduduk kawasan perbatasan ini disediakan dokumen imigrasi khusus untuk keperluan keluar masuk wilayah masing-

masing negara. Dokumen tersebut dikenal sebagai Pas Lintas Batas.

Tabel 1.3 dibawah ini menunjukkan frekuensi keluar-masuk pelintas

batas dengan menggunakan Pas Lintas Batas (PLB).

Tabel 1.3
Perkembangan Keluar Masuk PLB Kalbar-Sarawak

No	Tahun	Asal Keluar	Kalbar Masuk	Asal Keluar	Sarawak Masuk
1	1989	8424	7717	1042	1084
2	1990	21740	20093	1418	1504
3	1991	30639	28812	2224	2286
4	1992	28927	27061	2880	2847
5	1993	30791	30753	2593	2765
6	1994	49757	39789	7872	8612

Sumber : Bappeda Tk I Kalimantan Barat, 1995

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengembangan PPLB akibat peningkatan fungsinya menjadi pintu lalu lintas internasional dan pos pemeriksaan lintas batas masyarakat non tradisional.
2. Dan bagaimanakah penataan ruang-ruang (penzoningan) yang bisa mendukung perkembangan fungsi PPLB tersebut.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah dihasilkan konsep perencanaan dan perancangan Pos Pemeriksaan Pelintas Batas dengan sasarannya menyelesaikan permasalahan yang ada akibat pengembangan fungsinya, serta kondisi yang ada di PPLB.

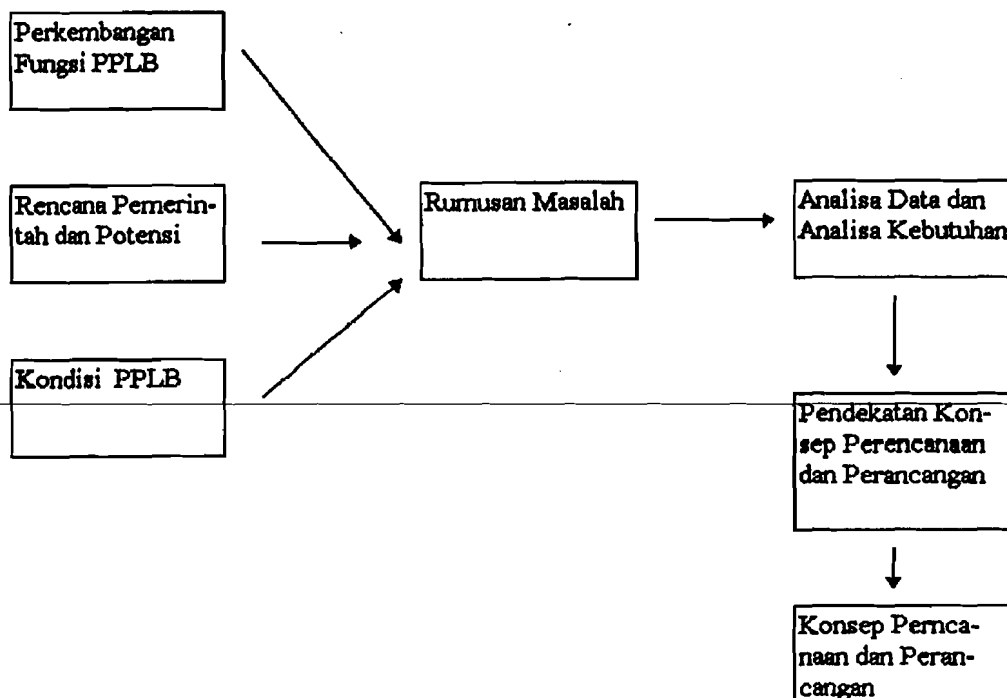
D. LINGKUP PEMBAHASAN

Penulisan ini dibatasi hanya pada perencanaan dan perancangan PPLB yang mengkaitkan proses pemeriksaan dan fasilitas penunjang pemeriksaan akibat perkembangan fungsi PPLB.

Data yang dipilih untuk menganalisis fasilitas pemeriksaan bersandar pada data prosedur pemeriksaan CIQ (Custom, Immigration and Quarantine).

E. METODE PEMBAHASAN

Metode pembahasan yang digunakan untuk menganalisis masalah dengan alur sebagai berikut :



Gb. 1.3. Skema metode pembahasan

F. SISTEMATIKA PENULISAN

~~Berturut-turut skripsi ini akan membahas permasalahan diatas~~
dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I membahas Pendahuluan. Di dalamnya akan mengungkapkan latarbelakang, dengan menyebutkan permasalahan yang muncul. Kemudian disebutkan pula tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Setelah itu penjelasan lingkup pembahasan dan metode pembahasan yang diambil serta sistematika penulisan.

BAB II berisikan uraian mengenai Pos Pemeriksaan Lintas Batas, yang terdiri dari bagian pertama pengertian PPLB, lalu tinjauan umum yang antara lain berisi tugas dan fungsi, latarbelakang berdirinya PPLB. Diungkapkan pula teori lalu bagian akhir menjelaskan tinjauan khusus dari permasalahan.

BAB III mengetengahkan analisa situasi dan kondisi yang ada, serta pendekatan konsep bagi perencanaan dan perancangan.

BAB IV adalah kesimpulan dari analisis yang didapat di bagian ketiga penulisan ini.

BAB V bagian akhir dari penulisan ini memuat konsep-konsep perencanaan dan perancangan.

BAB II

POS PEMERIKSAAN LINTAS BATAS, TEORI BENTUK DAN FUNGSI, ENVIRONMENTAL DESIGN

A. PENGERTIAN

Pos Pemeriksaan Lintas Batas : pos pemeriksaan keluar-masuknya orang, barang dan kendaraan melalui darat dari dan ke suatu negara.

Daerah perbatasan: daerah daratan, laut dan udara di atasnya sepanjang perbatasan bersama kedua negara, yang batas luas daerahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan persetujuan kedua negara.

Kawasan Penyangga Perbatasan : dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap arus barang dan manusia yang keluar masuk Indonesia, untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perbatasan adalah kawasan yang berada sepanjang perbatasan sejauh-jauhnya 4km dari garis perbatasan.

B. TINJAUAN UMUM

1. Tugas Dan Fungsi PPLB

Berdasarkan ketentuan hukum internasional, tugas dan fungsi yang terkait langsung bagi PPLB adalah apa yang dikenal dengan istilah CIQ (Custom, Immigration and Quarantine), yaitu : bea dan cukai, imigrasi, dan karantina.

Tugas pokok instansi yang terlibat dalam CIQ adalah:

a. Bea dan Cukai bertugas :

- 1) Memberikan pelayanan pabean atas impor/kedatangan pelintas batas, termasuk barang dan kendaraan.

-
- 2) Memberikan pelayanan pabean atas ekspor dan keberangkatan pe-
lintas batas, termasuk barang, dan kendaraan dari Kalimantan
Barat.

b. Imigrasi bertugas :

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap kedatangan / keberangkatan orang, baik yang tradisional yang menggunakan Pas Lintas Batas maupun pelintas batas yang mempergunakan paspor serta alat angkut atau kendaraan yang dipergunakan.
- 2) Memberikan ijin masuk tanda bertolak atas kedatangan / keberangkatan pelintas batas dari dan ke wilayah Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kedudukan ini pejabat Imigrasi berwenang menolak orang asing dan atau untuk tidak memberikan ijin masuk ke wilayah Indonesia.

c. Karantina (hewan, tumbuh-tumbuhan dan kesehatan) bertugas :

- 1) Berwenang dan bertanggung jawab untuk mencegah keluar-masuk flora, fauna yang dilindungi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta mengadakan pencegahan terhadap penyakit menular (penyakit karantina dan penyakit lainnya).
- 2) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan flora, fauna serta obat-obatan/alat-alat kesehatan/makanan dan minuman yang keluar masuk melalui PPLB Entikong, termasuk pencegahan terhadap wabah penyakit menular.

Selanjutnya, terdapat pula instansi yang sifat tugas dan fungsinya tidak langsung berkenaan dengan CIQ, akan tetapi memberikan dukungan pelayanan keluar masuknya orang, barang dan kendaraan melalui PPLB Entikong. Instansi pendukung tersebut antara lain :

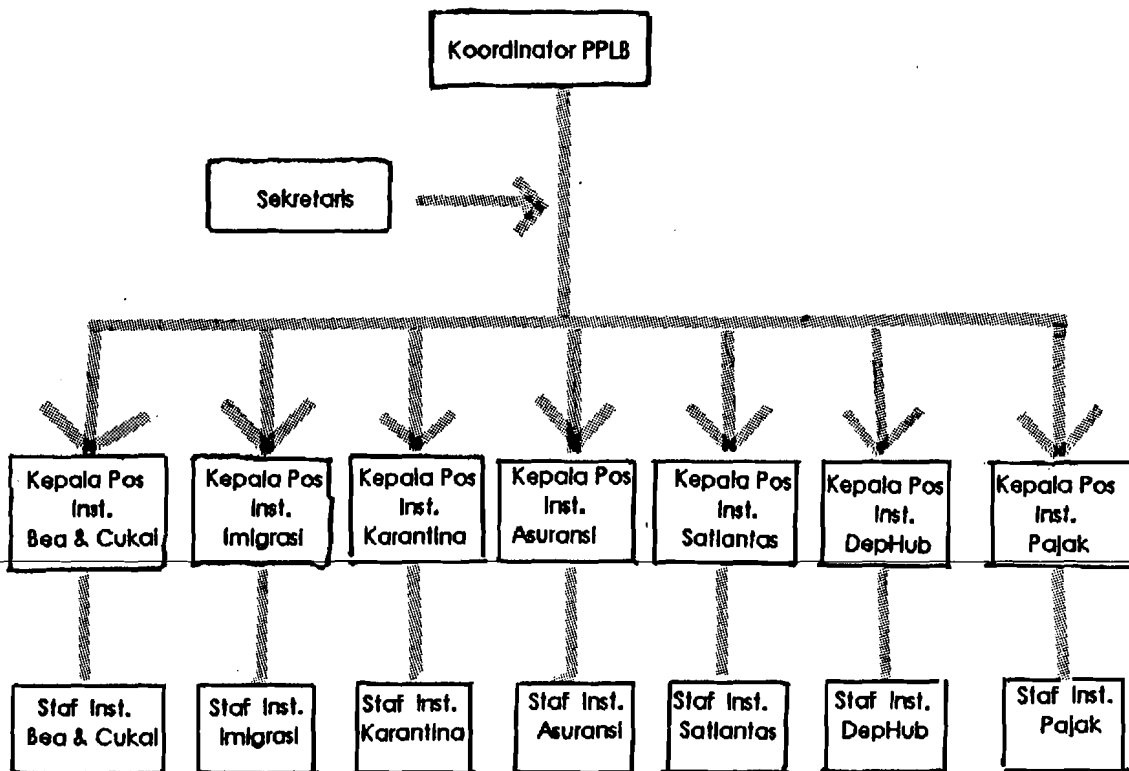
- ~~d. Pajak, yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan tanda bukti pembayaran fiskal luar negeri bagi pelintas batas yang mempergunakan paspor yang akan berangkat melalui PPLB Entikong, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.~~
- e. Perhubungan/LLJR bertugas untuk menangani pemeriksaan laik jalan kendaraan yang akan melintas batas dan mengeluarkan tanda laik jalan lintas batas, berupa pemasangan stiker pada kendaraan tersebut.
- f. PT (Persero) Asuransi Jasa Raharja, bertugas untuk :
- 1) Melaksanakan pungutan asuransi kecelakaan dalam perjalanan.
 - 2) Melaksanakan pungutan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dan asuransi kendaraan.
 - 3) Memberikan informasi yang berkaitan dengan tugas perasuransian.
- g. Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi bertugas untuk memberikan bantuan kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.
- h. Petugas Lalu-lintas/Polisi bertugas untuk mengadakan pemeriksaan terhadap registrasi dan atau identifikasi kendaraan bermotor, orang dan barang yang diduga hasil pelaku/hasil kejahatan. Disamping itu, juga bersama-sama satuan KOREM 121/ABW melakukan patroli pengamanan PPLB Entikong serta pengamanan teritorial daerah perbatasan dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik dari dalam maupun luar wilayah Indonesia.
- i. Bank Pembangunan Daerah bertugas untuk melayani money changer, menerima tabungan, deposito dan pengiriman uang, serta memberikan informasi mengenai pelayanan jasa bank lainnya.

j. Pemerintah Daerah Tk. I Kalimantan Barat, melalui Kelompok Kerja Sosial Ekonomi MALINDO Tingkat Daerah, bertugas :

- 1) Menyediakan, melengkapi dan menyempurnakan fasilitas dan prasarana/sarana yang diperlukan petugas di PPLB Entikong.
 - 2) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pelayanan dan pelaksanaan kesepakatan antara kedua negara yang secara operasional berlangsung di PPLB Entikong.
 - 3) Menunjuk dan atau menetapkan pejabat dari instansi untuk bertindak dan bertanggungjawab terhadap kelancaran tugas dan fungsi PPLB Entikong.
 - 4) Mengantisipasi pelaksanaan kesepakatan antara kedua negara dan mengambil keputusan terhadap permasalahan yang terjadi di PPLB Entikong, sebagai bahan masukan dalam pertemuan KK/JKK SOSEK MALINDO Tingkat Daerah/Negeri dan atau pertemuan KK SOSEK Indonesia.
 - 5) Menerima laporan pelaksanaan tugas setiap instansi secara periodik.
- k. Karena banyak instansi yang berkaitan dengan kegiatan di PPLB, maka ditunjuk koordinator PPLB, yang mempunyai tugas dan fungsi :
- 1) Melaksanakan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan semua instansi terkait dan melakukan konsultasi dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) Menegakkan dan melaksanakan semua ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku, termasuk petunjuk dan pedoman yang diberikan oleh KK SOSEK MALINDO Tingkat Daerah Kalimantan

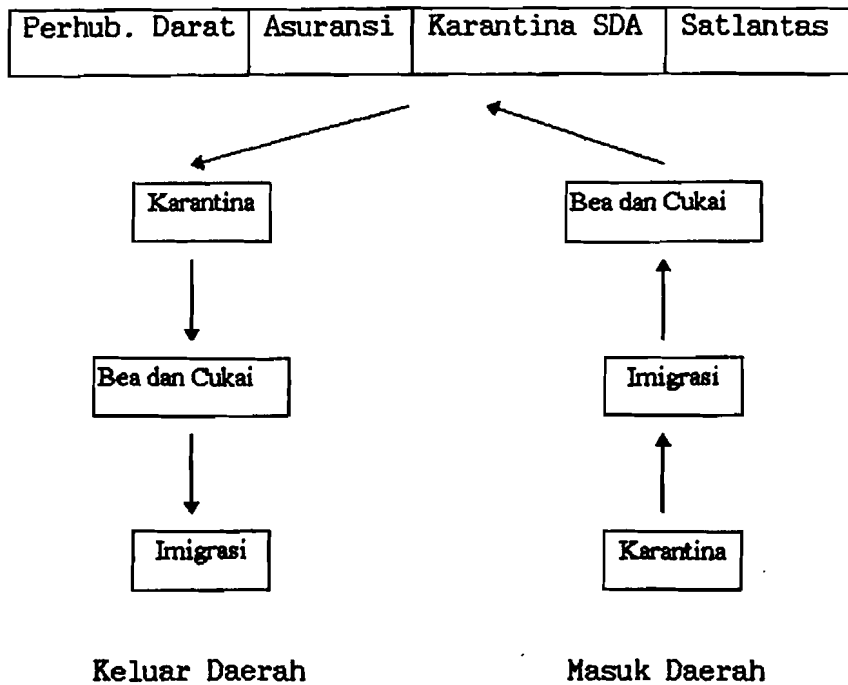
Barat, sebagai pelaksanaan dari kesepakatan yang diambil kedua negara.

- 3) Melakukan pembinaan dan pengarahan kepada instansi yang terlibat dalam tugas dan fungsi PPLB Entikong, serta memelihara keamanan dan ketertiban di PPLB Entikong sehingga tercipta kerjasama yang harmonis, baik sesama petugas di PPLB Entikong maupun antar pejabat kedua Pos Lintas Batas (PPLB Entikong dan Pos Imigresen Tebedu).



Gb. 2.1. Struktur Organisasi PPLB

2. Prosedur Pemeriksaan Lalu Lintas Orang, Barang Dan Kendaraan



Gb. 2.2. Skema prosedur pemeriksaan

Waktu pemeriksaan kurang lebih 15 menit.

Masing-masing alur pemeriksaan terbagi lagi atas dua jalur:

- a. Green Line: bagi pelintas batas yang memenuhi syarat-syarat melintas batas.
- b. Red Line: bagi pelintas batas yang mempunyai masalah dengan syarat-syarat melintas batas.

3. Latarbelakang Berdirinya PPLB

Indonesia dan Malaysia dua negara bertetangga yang mempunyai dua garis batas sama di Pulau Kalimantan. Meskipun kedua negara memperoleh kemerdekaannya dengan cara yang berbeda, namun dalam be-

~~berapa hal mempunyai persamaan, sebagai negara yang berbatasan lang-~~
~~sung, kedua negara mempunyai aspirasi dan persepsi yang sama menge-~~
nai ancaman yang timbul melalui daerah perbatasan. Tercapainya sta-
bilitas keamanan di daerah perbatasan adalah merupakan cita-cita dan
harapan bersama. Oleh karena itu dalam upaya untuk mewujudkan
keinginan ini kedua negara telah menjalin hubungan kerjasama di
berbagai bidang.

Kerjasama di bidang keamanan daerah perbatasan telah dimulai
sejak tahun 1967 yaitu dengan ditandatanganinya persetujuan mengenai
peraturan dalam bidang keamanan di daerah-daerah perbatasan. Kemu-
dian kerjasama ini dirubah dan disempurnakan pada tahun 1972, dan
selanjutnya pada tahun 1984 persetujuan tersebut direvisi kembali,
disesuaikan dengan tuntutan perkembangan yang dihadapi.

Pertimbangan utama untuk membuka daerah perbatasan dengan
adanya hubungan resmi antara Indonesia dan Malaysia ini, terutama di
daerah perbatasan Kalimantan Barat - Sarawak adalah untuk mengan-
tisipasi berkembangnya pergerakan dan pertahanan komunis yang sebe-
lumnya berbasis di daerah ini, yaitu PGRS (Pasukan Gerilyawan Rakyat
Sarawak) dan PARAKU (Pasukan Rakyat Kalimantan Utara). Kemudian se-
jak tahun 1984 kerjasama keamanan tersebut diperluas hingga mencakup
semua jenis ancaman, ideologi, politik, sosial budaya dan ekonomi.
Demikian pula dengan daerah operasinya turut diperluas hingga ke se-
luruh daerah perbatasan darat, laut dan udara.

Gagasan untuk melaksanakan kerjasama bidang sosio ekonomi di
daerah perbatasan Indonesia Malaysia pertama kali dicetuskan oleh
Dato Musa Hitam, Wakil Perdana Menteri Malaysia, ketua General Bor-

~~der Committee (GBC) Malaysia pada sidang ke XII GBC di Kuala Lumpur tanggal 14 Nopember 1983, yang kemudian mendapat tanggapan positif dari Jenderal TNI L.B. Moerdani selaku Panglima ABRI, ketua GBC Indonesia.~~

Setelah sidang tersebut berakhir, maka Staff Planning Committee (SPC) Malindo sebagai koordinator perencana kegiatan GBC menugaskan beberapa pejabat untuk merintis usaha-usaha tercapainya kerjasama pembangunan sosio ekonomi itu. Dipihak Indonesia adalah Asisten Teritorial Kasum ABRI, sedang di pihak Malaysia adalah Timbalan Setia Usaha (Wakil Sekretaris) Majelis Keselamatan Negara, Kantor Perdana Menteri Malaysia.

Pada akhirnya dalam sidang ke XVIII SPC Malindo yang diselenggarakan di Kuala Lumpur tanggal 13 Pebruari 1985, memutuskan, menerima dan meluluskan pembentukan Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa (KK/JKK) Bersama Pembangunan Sosek Malindo, yang akan hanya bertanggungjawab memajukan dan menyelaraskan /mengkoordinasikan atas dasar kegiatan pembangunan sosio-ekonomi.

Salah satu wujud pelaksanaan dari kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia dari pertemuan General Border Committee tersebut adalah pembangunan dan penyediaan Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong di Propinsi Kalimantan Barat (Indonesia) dan Pos Tebedu di wilayah Sarawak (Malaysia). Seluruh kesepakatan yang diambil kedua negara melalui KK/JKK Sosek Malindo Tingkat pusat maupun KK/JKK Sosek Malindo daerah Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak, sepanjang berkaitan dengan prosedur keluar masuk orang, barang dan kendaraan dilaksanakan oleh Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong di

Propinsi Kalimantan Barat dan Pos Imigrasi Tebedu di Wilayah Negeri Sarawak.

Implikasi pembukaan daerah perbatasan ini (penyambungan jalan raya Entikong-Tebedu) antara lain:

- a. Membuka isolasi daerah perbatasan.
- b. Memberi kemudahan lalu lintas kepada manusia dan barang.
- c. Memudahkan pengawasan dan pengendalian keamanan.
- d. Mengurangi penggunaan jalan setapak yang selama ini dipergunakan.
- e. Meningkatkan mobilitas masyarakat.
- f. Memperlancar urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kerjasama pembangunan daerah perbatasan.
- g. Memperlancar urusan peningkatan perdagangan dan pariwisata.

4. Pelaku PPLB

Sesuai dengan fungsinya sebagai pintu lalu-lintas internasional, Pelaku yang ada di PPLB adalah:

a. Orang:

- 1) Petugas: yang menjalankan segala macam proses pemeriksaan.
- 2) Pengelola usaha jasa: melayani segala kegiatan servis/penunjang.
- 3) Pelintas Batas: yang melakukan kegiatan melintas batas.

b. Barang:

- 1) Barang-barang untuk tujuan perdagangan.
- 2) Barang-barang yang dibawa pelintas batas.

c. Kendaraan:

- 1) Kendaraan pribadi pelintas batas.
- 2) Kendaraan umum.
- 3) Kendaraan pengangkut barang-barang perdagangan.

C. BENTUK DAN FUNGSI

Bentuk adalah suatu media atau alat komunikasi untuk menyampaikan arti yang dikandung oleh bentuk itu sendiri atau untuk menyampaikan pesan tertentu dari arsitek kepada masyarakat sebagai penerima. Bentuk mempunyai peran yang lahir dari fungsi, selain itu bentuk itu sendiri juga diwujudkan oleh bahan, struktur dan simbol.

Menurut Louis Khan, bentuk mengikuti fungsi (form follow function). Pemikirannya didasari oleh kegiatan manusia sebagai makhluk yang berakal di dunia melahirkan fungsi yang terwujud dalam bentuk untuk menampung kegiatan manusia.

Semakin tinggi kebudayaan manusia, semakin banyak cabang kegiatan, berarti semakin rumit pula fungsi. Oleh sebab itu secara naluri manusia berkeinginan agar bentuk-bentuk arsitektur mencerminkan identitas fungsinya.

Fungsi adalah kriteria utama bagi setiap perancangan bentuk, dan fungsi adalah suatu cara untuk memenuhi keinginan. Fungsi dalam arti yang sangat sederhana ialah kegunaan. Tujuan fungsi ialah tujuan kegunaan.

Faktor-faktor yang mewujudkan bentuk

1. Fungsi

Batasan fungsi secara umum dalam arsitektur adalah pemenuhan terhadap aktivitas manusia, tercakup didalamnya kondisi alami. Sedangkan bangunan yang fungsional adalah bangunan yang dalam pemakaiannya memenuhi kebutuhan secara tepat dan tidak mempunyai unsur-unsur yang tidak berguna.

Aktivitas timbul dari kebutuhan manusia itu baik kebutuhan jasmani maupun rohani, berupa kebutuhan kegiatan, perlindungan, kenyamanan, dan lain sebagainya.

Fungsi sendiri dapat berkembang dan berubah.

2. Simbol

Semakin lama, manusia sangat memerlukan identitas baik bagi dirinya, maupun bagi benda-benda yang ada di sekelilingnya. Pada kenyataan sehari-hari kebutuhan akan identitas tersebut ditampilkan secara gamblang, atau dengan simbol-simbol.

Dalam dunia arsitektur, pengenalan simbol merupakan suatu proses yang terjadi pada individu dan masyarakat. Melalui indra penglihatan manusia mendapat rangsangan yang kemudian menjadi pra persepsi, terjadi pengenalan obyektif (fisik). Selanjutnya terwujud persepsi. Persepsi ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman termasuk pengalaman pendidikan yang menentukan tingkat intelektual manusia. Tingkat penyesuaian ini berbeda-beda pada setiap individu, ini juga diakibatkan oleh pengalaman dan tingkat intelektual yang berbeda, meskipun begitu, masih ada sesuatu dasar yang sama pada setiap individu yang tergabung dalam suatu kelompok

masyarakat, yaitu kebudayaan. Inilah yang lebih membuka kemungkinan bagi suatu masyarakat untuk menghasilkan penilaian yang sama.

3. Teknologi Strukur dan Bahan

D. ENVIRONMENTAL DESIGN

Suatu proses desain antara lain melibatkan perilaku lingkungan. Bangunan adalah suatu sarana yang memodifikasi atau dimodifikasi oleh suasana sosial, ekonomi, politik, fisik, estetika, dan lain-lain, agar tercipta kenyamanan. Suatu bangunan adalah filter atau saringan dari keadaan-keadaan lingkungan eksternal dan pengguna bangunan (user). Suatu desain arsitektural dapat menghasilkan suatu gabungan dari tiga sistem yaitu sistem manusia (human system), sistem lingkungan (segala sesuatu yang ada dalam lingkungan eksternal), dan sistem bangunan itu sendiri.

Fungsi, atau menurut Garry T. Moore adalah pengkajian lingkungan perilaku, dalam arsitektur meliputi penyelidikan sistematis tentang hubungan-hubungan diantara lingkungan dan perilaku manusia dan penerapannya dalam proses perancangan. Hal-hal pokok yang tercakup antara lain bagaimana orang mengadakan interaksi dengan lingkungan mereka, apa kebutuhan-kebutuhan mereka, dan lain-lain. Jangkauan faktor-faktor perilaku dapat pula mengarah ke unsur psikologis si pemakai, misalnya bagaimana dia memahami bentuk bangunan, kebutuhan-kebutuhan interaksi masyarakat, perbedaan-perbedaan budaya dalam kehidupan, dan makna serta simbolisme bangunan-bangunan. Menurut Moore ini pula, perilaku adalah suatu fungsi dari tuntutan-tuntutan organisme dalam dan lingkungan sosio fisik luar.

Irwin Altman mengemukakan tiga komponen pokok untuk melihat informasi perilaku lingkungan, yaitu:

a. Fenomena perilaku lingkungan.

Contoh-contoh fenomena perilaku lingkungan antara lain meliputi makna dan simbolisme lingkungan dan cara-cara manusia menggunakan lingkungan dalam menyajikan diri. Manusia bereaksi pada lingkungan melalui maknanya bagi diri manusia itu. Bangunan mempunyai makna-makna tertentu bagi masyarakat yang dipengaruhi oleh tata letak, organisasi dan sifat-sifat bangunan.

b. Kelompok-kelompok pemakai.

Kelompok pemakai yang berbeda-beda mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dan dipengaruhi dalam berbagai cara oleh sifat lingkungan.

c. Pelataran (ruang/bangunan).

Lingkungan merupakan pelataran untuk komunikasi di kalangan masyarakat maupun untuk menyebarkan makna-makna. Komunikasi diantara masyarakat mungkin dipengaruhi oleh pengaturan ruang.

Tabel 2.1 (lampiran) menggambarkan pola hubungan yang terjadi pada sistem manusia, sistem lingkungan eksternal dan sistem bangunan.

Masih dalam konteks Environmental Designs, Abraham Wandersman dan kawan-kawannya mengemukakan, ada hubungan antar manusia,

lingkungan dan prilaku¹. Pandangan menyeluruh dari hubungan antara lingkungan dan manusia harus mempertimbangkan hal-hal:

1. Elemen-elemen lingkungan (fisik dan sosial), prilaku dan manusia (sifat-sifat pribadi dan sosial).
2. Hubungan antara elemen-elemen dan proses (adaptasi dan penerapan) yang menghubungkan elemen-elemen tersebut.

Mereka mengungkapkan pula, bahwa H. Wright dalam penyelidikannya mengenai "pengaturan prilaku" (behavior setting) mendapatkan fakta bahwa dalam suatu kelompok dengan aturan yang telah ditetapkan, orang-orang yang berbeda akan berperilaku sama dan dapat menda-dak berubah prilakunya bila berpindah ke kelompok yang telah diatur lainnya².

E. TINJAUAN KHUSUS

1. Lokasi

PPLB Indonesia terletak 3 km dari Dusun Entikong, 18 km dari ibukota Kecamatan Sekayam yaitu Balai Karang, dan 310 km dari Pontianak ibukota Kalimantan Barat.

Pos Imigresen Malaysia terletak 3 km dari Sub District Tebedu, 150 km dari Kuching ibukota negara bagian Sarawak Malaysia.

2. Karakteristik Fisik Dasar

- a. Fisiografi Site berbukit-bukit, sedangkan keadaan tanah relatif rata pada area bangunan PPLB.

¹ Andrew D. Seidel and Scott Danford, *Environmental Design: Research, Theory, and Application*, (1979), p. 162.

² *Ibid*, p. 163.

b. Iklim: menurut sistem Koopen, iklim di daerah perbatasan dikelompokkan sebagai afaw, yaitu iklim isothermal hujan tropik dengan musim kemarau panas. Curah hujan rata-rata berkisar antara 3000-4500 mm/th dengan 4-12 hari bulan basah. Temperatur bervariasi dari 26,3-27,8°C. Kelembaban nisbi rata-rata pertahun antara 87%-89,9%, dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 0,24-1,34mm/det. Lama penyinaran matahari rata-rata adalah 15mm/hari.

3. Perkembangan PPLB

Perkembangan PPLB dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dengan peningkatan fungsinya sebagai pintu gerbang internasional (lalu lintas internasional), menyebabkan jenis kegiatan dan jenis pelintas batas meningkat. Sehingga pelaku PPLB adalah :

a. Petugas/pengelola PPLB

- 1) Petugas yang berkaitan dengan prosedur pemeriksaan
- 2) Penjual Jasa : pengangkut barang, pengelola kantin, dll.

b. Pelintas Batas

- 1) Orang : masyarakat tradisional (penduduk kawasan perbatasan), masyarakat non tradisional (penduduk bukan kawasan perbatasan).
- 2) Barang : barang-barang perdagangan, barang yang dibawa pelintas batas orang.
- 3) Kendaraan : pribadi, umum (bis), pengangkut barang perdagangan.

c. Pelaku yang secara tidak langsung terkait dengan PPLB

- 1) Kendaraan penjemput/pengantar: umum, pribadi
- 2) Orang: penjemput/pengantar

4. Kebijakan Pemerintah

a. Indonesia

Kebijakan pembangunan untuk wilayah perbatasan antara lain:

- 1) Pembangunan di wilayah perbatasan harus senantiasa berwawasan pembangunan nusantara dalam rangka mewujudkan satu kesatuan Poleksosbud dan Hankam.
- 2) Prioritas pembangunan adalah pembinaan aparat pemerintahan, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan memelihara orientasi nasional penduduk perbatasan.

b. Malaysia

Menyongsong diberlakukannya perdagangan bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area) tahun 2003 dan kerjasama pertumbuhan wilayah ASEAN Timur (BIMP-EAGA), Sarawak memacu pembangunan di segala bidang. Kota Kuching direncanakan sebagai pusat perdagangan dan pariwisata penting di wilayah ASEAN Timur, dan dikembangkan sebagai bandar bertaraf internasional³.

Kota Tebedu sebagai pusat lokal dan kota Serian sebagai pusat regional Sarawak Bagian Tengah adalah kota-kota yang berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi barang-barang dari Kawasan Perbatasan Bagian Tengah dan Kalimantan Barat secara umum yang dialirkan melalui pintu Entikong. Barang-barang yang mengalir lewat Entikong kemudian diekspor ke Sarawak, terutama

³ Kompas, 23 Oktober 1995, Kalbar, Embarkasi Penting TKI ke Sarawak, hal. 16 kol. 1.

barang-barang yang berasal dari Pontianak, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang⁴.

5. Kondisi di PPLB

a. Menurut Besaran dan Kebutuhan Ruang

Sesuai dengan standar pemeriksaan CIQ (Custom, Immigration and Quarantine), PPLB Entikong telah mempunyai prosedur-prosedur pemeriksaan yang sesuai. Namun hanya beberapa bagian prosedur yang mempunyai wadah bagi petugasnya atau wadah yang menunjang prosedur pemeriksaan, yaitu:

- 1) Bea dan Cukai, tersedia 1 ruang kantor 3x5 untuk 6 petugas, terdapat di bangunan utama.
- 2) Imigrasi, tersedia 1 ruang kantor 3x5 untuk 6 petugas terletak di bangunan utama.
- 3) Bank dan Asuransi, bersama-sama menempati ruang 3x5m, terletak di bangunan utama.
- 4) Koordinator PPLB, ruang kantor terpisah 150m dari bangunan utama.

Selain instansi tersebut, belum ada wadah bagi instansi lainnya.

5) Ruang servis:

Di PPLB kantin berukuran 6x4m, lavatory di bangunan utama, langgar. Parkir yang semula disediakan untuk kendaraan pribadi para penjemput/pengantar pelintas batas digunakan untuk terminal kendaraan umum. Tidak ada ruang tunggu bagi penjemput/pengantar dan

⁴ Perda Tk I Propinsi Kalimantan Barat, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat, Rencana (Maret 1994), p. 2.1.

ruang khusus untuk para pengangkut barang selama mereka menunggu pekerjaan.



Gb. 2.3. Para pengangkut barang sedang menunggu pekerjaan di garis batas wilayah negara



Gb. 2.4. Memberi Pekerjaan Untuk Mengangkut Barang di Pintu Masuk Kedua Negara

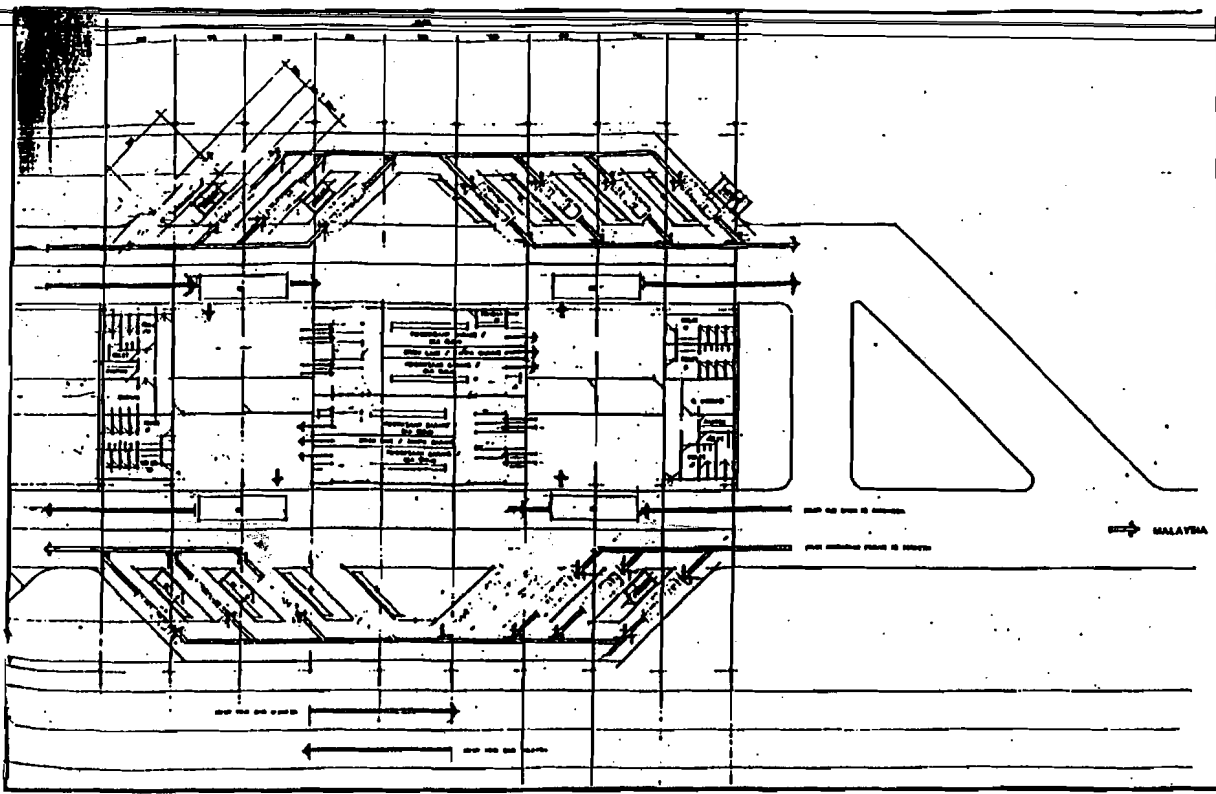
b. Sirkulasi

Sebagai tempat untuk pemeriksaan lalu lintas internasional, jalur sirkulasi yang ada diperuntukkan khusus proses pemeriksaan bagi orang, kendaraan bis, kendaraan barang dan kendaraan pribadi, dengan sirkulasi untuk semua jenis kendaraan pada satu alur masuk. Tidak ada jalur khusus untuk pengangkut barang.



Gb.2.4. Para pengangkut barang yang menggunakan jalur sirkulasi kendaraan (bis).

Adanya satu alur masuk untuk semua jenis kendaraan dapat menyebabkan proses penungguan pula, tidak ada pemisahan sirkulasi dari awal sebagaimana tergambar pada gambar 2.5. Bila pada satu alur terjadi antrian, untuk masuk alur yang lain akan terhambat oleh antrian tersebut.



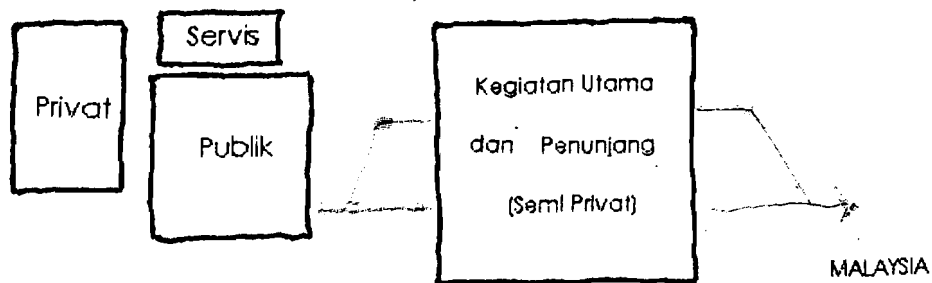
□ Daerah rawan penumpukan (sumber kemacetan)

Gb. 2.5. Daerah Potensial Rawan Penumpukan Kemacetan

Pada alur proses pemeriksaan, terjadi cross sirkulasi. Ini diakibatkan karena urutan prosedur pemeriksaan bermacam-macam/diselingi dengan kegiatan penunjang. Adanya sarana money changer pada jalur pemeriksaan akan mengurangi kecepatan proses.



Gb.2.6. Kantor Instansi penunjang kegiatan yang berada di deretan Instansi kegiatan utama



Gb.2.7. Skema perzonongan di area PPLB

c. Waktu Pemeriksaan

Waktu yang diperlukan untuk proses pemeriksaan keluar dan masuk wilayah Indonesia mencapai 25-30 menit per orang. Perpanjangan waktu ini dapat disebabkan adanya kegiatan tambahan yang dilakukan di bangunan utama PPLB.

d. Menurut Prilaku Pelaku PPLB

Secara eksternal pola pergerakan penduduk antar negara (penduduk pelintas batas) memiliki karakteristik yang berbeda antara penduduk Sarawak ke Indonesia atau sebaliknya. Pelintas batas dari Indonesia ke Sarawak lebih didasarkan pada kepentingan ekonomi (perdagangan), sedangkan bagi penduduk Sarawak ke Indonesia selain kepentingan ekonomi, juga lebih kepada pemenuhan kebutuhan sosial (hiburan/rekreasi)⁵.

e. Jadwal PPLB

PPLB ini dibuka hanya 12 jam sehari. Yaitu dimulai pada jam 06.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB

Karena adanya peningkatan fungsi Pos Pemeriksaan Lintas Batas menjadi pintu gerbang lalulintas internasional, serta adanya kecenderungan meningkatnya jenis dan jumlah pelintas batas, maka fasilitas yang adapun harus diperhitungkan untuk mengantisipasi hal tersebut. Tentu perencanaan dan penambahan fasilitas memerlukan pe-nataan sedemikian rupa, dengan mempertimbangkan antara lain faktor pelaku, dan jenis kegiatan, sehingga kecepatan dan kelancaran seba-gai syarat mutlak kegiatan PPLB dapat dimaksimalisasikan.

⁵ Pemerintah Daerah Tk I Propinsi Kalimantan Barat, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat, Fakta dan Analisis (Januari 1994), p. 3.57.

BAB III
ANALISA KEBUTUHAN FASILITAS DAN
PENATAAN RUANG-RUANG DI PPLB

A. DASAR PEMIKIRAN

1. PPLB berfungsi sebagai pintu lalu lintas internasional menjalankan tugas sesuai dengan syarat-syarat bea cukai, imigrasi dan karantina.
2. Penataan ruang-ruang menurut jenis kegiatan dan lamanya penggunaan waktu pada masing-masing kegiatan.

B. PERKEMBANGAN FUNGSI PPLB

Perkembangan fungsi PPLB yang semula melayani pemeriksaan pelintas batas tradisional, kemudian menjadi pos pemeriksaan bagi lalu lintas internasional, menyebabkan jenis pelintas batas bertambah dengan pelintas batas non tradisional (bertambahnya pelaku pada PPLB).

1. Analisa Pertambahan Jumlah Pelintas Batas dan Petugas PPLB

Dengan proyeksi pertambahan pelintas batas dalam 10 tahun mendatang, akan didapatkan jumlah petugas yang diperlukan untuk proses pemeriksaan. Dari perhitungan tersebut, didapat pula besaran ruang yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan.

Untuk menghitung proyeksi pertambahan jumlah pelintas batas, digunakan rumus sebagai berikut:

$$P_{ii} = P_i (1 + p)^{n-1}$$

P_{ii} = Tahun yang dimaksud

P_i = Tahun dasar perhitungan

p = Koefisien pertumbuhan

n = Range tahun

a. Pelintas Batas Orang (Non Tradisional)

- Masuk Kalimantan Barat:

$$P_{94} = P_{90} (1 + p)^{n-1}$$

$$32.185 = 12.805 (1 + p)^{4-1}$$

$$(1 + p)^3 = 2,5135$$

$$p = 0,3596$$

Proyeksi 10 tahun mendatang :

$$P_{2004} = P_{1994} (1 + p)^{10-1}$$

$$= 32.185 (1 + 0,3596)^9$$

$$= 510.921,19$$

Dalam 1 hari jumlah pelintas batas:

$$510.921,19 \text{ orang} : 365 \text{ hari} = 1399,8 \approx 1400 \text{ orang/hari}$$

Jika setiap pemeriksaan untuk 1 orang membutuhkan maksimal waktu

2 menit, maka waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa:

$$1400 \text{ orang} \times 2 \text{ menit} = 2800 \text{ menit} = 46,7 \text{ jam}$$

Waktu pemeriksaan adalah 12 jam/hari, maka dibutuhkan petugas pemeriksaan sebanyak:

$$46,7 \text{ jam} : 12 \text{ jam} = 3,9 \approx 4 \text{ orang}$$

- Keluar Kalimantan Barat:

$$P_{94} = P_{90} (1 + p)^{n-1}$$

$$43.992 = 18.334 (1 + p)^{4-1}$$

$$(1 + p)^3 = 2,3994$$

$$p = 0,3388$$

Proyeksi 10 tahun mendatang :

$$P_{2004} = P_{1994} (1 + p)^{10-1}$$

$$= 43.992 (1 + 0,3388)^9$$

$$= 607.876,06$$

Dalam 1 hari jumlah pelintas batas:

$$607.876,06 \text{ orang} : 365 \text{ hari} = 1665,4 \approx 1666 \text{ orang/hari}$$

Jika setiap pemeriksaan untuk 1 orang membutuhkan maksimal waktu

2 menit, maka waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa:

$$1666 \text{ orang} \times 2 \text{ menit} = 3332 \text{ menit} = 55,5 \text{ jam}$$

Waktu pemeriksaan adalah 12 jam/hari, maka dibutuhkan petugas pemeriksaan sebanyak:

$$55,5 \text{ jam} : 12 \text{ jam} = 4,6 \approx 5 \text{ orang}$$

b. Pelintas batas orang (tradisional)

- Masuk Kalimantan Barat

$$P_{94} = P_{90} (1 + p)^{n-1}$$

$$39.789 = 20.093 (1 + p)^{4-1}$$

$$(1 + p)^3 = 1,9802$$

$$p = 0,2557$$

Proyeksi 10 tahun mendatang :

$$\begin{aligned} P_{2004} &= P_{1994} (1 + p)^{10-1} \\ &= 39.789 (1 + 0,2557)^9 \\ &= 308.841,80 \end{aligned}$$

Dalam 1 hari jumlah pelintas batas:

$$308.841,80 \text{ orang} : 365 \text{ hari} = 846,1 \approx 847 \text{ orang/hari}$$

Jika setiap pemeriksaan untuk 1 orang membutuhkan maksimal waktu 2 menit, maka waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa:

$$847 \text{ orang} \times 2 \text{ menit} = 1694 \text{ menit} = 28,2 \text{ jam}$$

Waktu pemeriksaan adalah 12 jam/hari, maka dibutuhkan petugas pemeriksaan sebanyak:

$$28,2 \text{ jam} : 12 \text{ jam} = 2,3 \approx 3 \text{ orang}$$

- Keluar Kalimantan Barat:

$$\begin{aligned} P_{94} &= P_{90} (1 + p)^{n-1} \\ 49.757 &= 21.740 (1 + p)^{4-1} \\ (1 + p)^3 &= 2,2887 \\ p &= 0,3178 \end{aligned}$$

Proyeksi 10 tahun mendatang :

$$\begin{aligned} P_{2004} &= P_{1994} (1 + p)^{10-1} \\ &= 49.757 (1 + 0,3178)^9 \\ &= 596.347,93 \end{aligned}$$

Dalam 1 hari jumlah pelintas batas:

$$596.347,93 \text{ orang} : 365 \text{ hari} = 1633,8 \approx 1634 \text{ orang/hari}$$

Jika setiap pemeriksaan untuk 1 orang membutuhkan maksimal waktu 2 menit, maka waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa:

$$1634 \text{ orang} \times 2 \text{ menit} = 3268 \text{ menit} = 54,5 \text{ jam}$$

Waktu pemeriksaan adalah 12 jam/hari, maka dibutuhkan petugas pemeriksaan sebanyak:

$$54,5 \text{ jam} : 12 \text{ jam} = 4,5 \approx 5 \text{ orang}$$

c. Pertambahan pelintas batas kendaraan

- Masuk Kalimantan Barat:

$$P_{94} = P_{90} (1 + p)^{n-1}$$

$$3.377 = 1.799 (1 + p)^{4-1}$$

$$(1 + p)^3 = 1,8772$$

$$p = 0,2335$$

Proyeksi 10 tahun mendatang :

$$P_{2004} = P_{1994} (1 + p)^{10-1}$$

$$= 3.377 (1 + 0,2335)^9$$

$$= 22.324,59$$

Dalam 1 hari jumlah kendaraan:

$$22.324,59 \text{ orang} : 365 \text{ hari} = 61,16 \approx 62 \text{ kendaraan/hari}$$

Jika setiap pemeriksaan untuk 1 orang membutuhkan maksimal waktu

15 menit, maka waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa:

$$62 \text{ kendaraan} \times 15 \text{ menit} = 930 \text{ menit} = 15,5 \text{ jam}$$

Waktu pemeriksaan adalah 12 jam/hari, maka dibutuhkan petugas pemeriksaan sebanyak:

$$15,5 \text{ jam} : 12 \text{ jam} = 1,29 \approx 2 \text{ orang}$$

- Keluar Kalimantan Barat:

$$P_{94} = P_{90} (1 + p)^{n-1}$$

$$1.383 = 1.439 (1 + p)^{4-1}$$

$$(1 + p)^3 = 0,9611$$

$$p = -0,0131$$

Proyeksi 10 tahun mendatang :

$$P_{2004} = P_{1994} (1 + p)^{10-1}$$

$$= 1.383 (1 - 0,0131)^9$$

$$= 1.228,23$$

Dalam 1 hari jumlah pelintas batas:

$$1.228,23 \text{ kendaraan} : 365 \text{ hari} = 3,3 \approx 4 \text{ kendaraan/hari}$$

Jika setiap pemeriksaan untuk 1 orang membutuhkan maksimal waktu

15 menit, maka waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa:

$$4 \text{ kendaraan} \times 15 \text{ menit} = 60 \text{ menit} = 1 \text{ jam}$$

Waktu pemeriksaan adalah 12 jam/hari, maka dibutuhkan petugas pemeriksaan sebanyak: 1 orang

2. Analisa Kebutuhan Fasilitas

Dengan bertambahnya pelaku pada PPLB maka jenis kegiatan pun bertambah pula sebagaimana fungsinya melayani pemeriksaan bagi lalu lintas internasional, dan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku PPLB. Pada akhirnya kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan wadah atau fasilitas yang lebih lengkap. Dengan membandingkan fasilitas yang sudah ada dengan kebutuhan baru, akan didapat kekurangan fasilitas yang perlu dilengkapi.

Analisa kebutuhan ruang di PPLB diperoleh dengan dua cara:

- Melalui kegiatan formal yaitu menurut manajemen PPLB yang mengatur fungsi dan tugas yang otomatis menentukan kegiatan-kegiatan serta pelaku. Pada akhirnya pelaku dan kegiatan ini memerlukan wadah berupa ruang.
- Melalui kegiatan non formal di PPLB, yaitu pelaku diluar manajemen yang ada, namun terjadi di PPLB, kemudian dilihat kegiatan-kegiatan (prilaku) masing-masing pelaku yang melahirkan kebutuhan ruang untuk wadah kegiatan tersebut.

a. Hubungan Fungsi, Manajemen, Kegiatan dan Pelaku yang Melahirkan Kebutuhan ruang-ruang di PPLB (Kegiatan Formal)

Tugas dan fungsi PPLB adalah melakukan pemeriksaan terhadap keluar masuknya orang, barang dan kendaraan (pelintas batas) melalui darat, dari dan ke suatu negara, bersandar pada ketentuan Bea dan cukai, imigrasi dan karantina.

Sebagai suatu badan kerja, PPLB juga mempunyai suatu struktur organisasi seperti yang tergambar pada bab II, dengan masing-masing kegiatan dan petugasnya. Karena banyaknya instansi yang tercakup di PPLB, ada seorang koordinator yang mengkoordinir keseluruhan kegiatan teknis PPLB. Pada masing-masing instansi, ada seorang kepala pos instansi yang bertugas mengkoordinir kegiatan instansinya.

Kegiatan utama adalah pemeriksaan dengan pelaku adalah pemeriksa dan yang diperiksa. Pada akhirnya Semua kegiatan dan pelaku ini membutuhkan ruang sebagai wadah kegiatan.

Tabel 3.1. di bawah ini menguraikan hubungan antara manajemen, kegiatan dan pelaku serta kebutuhan ruang.

Tabel 3.1. Hubungan antara Manajemen, Kegiatan Pelaku dan Ruang

Manajemen	Kegiatan	Pelaku	Ruang
Koordinator PPLB	Mengkoordinir kegiatan PPLB	Koordinator PPLB	R. Koordinator
Sekretaris Koord. PPLB	Rapat koordinasi Melaksanakan kegiatan kesekretariatan PPLB	Petugas PPLB Sekretaris	R. rapat R. Sekretaris
Kepala Pos Inst. Bea dan Cukai	Mengkoordinir kegiatan Instansi Bea dan Cukai	Kepala Pos Instansi Bea dan Cukai	R. Instansi Bea dan Cukai
Staf Inst. Bea dan Cukai	Rapat koordinasi Pemeriksaan Bea dan Cukai pelintas batas	Petugas PPLB Staf Inst. Bea dan Cukai, pelintas batas	R. rapat R. Instansi Bea dan Cukai, r. pemeriksaan
Kepala Pos Inst. Imigrasi	Rapat koordinasi Mengkoordinir kegiatan Instansi Imigrasi	Petugas PPLB Kepala Pos Inst. Imigrasi	R. rapat R. Instansi Imigrasi
Staf Instansi Imigrasi	Pemeriksaan Imigrasi pelintas batas	Staf Instansi Imigrasi, pelintas batas	R. Instansi Imigrasi, r. pemeriksaan
Kepala Pos Instansi Karantina	Rapat koordinasi Mengkoordinir kegiatan Instansi karantina	Petugas PPLB Kepala Pos Instansi Karantina	R. rapat R. Instansi Karantina
Staf Instansi Karantina	Pemeriksaan karantina pelintas batas	Staf Instansi Karantina, pelintas batas	R. Instansi Karantina, r. pemeriksaan karantina
Kepala Pos Inst. DepHub	Rapat koordinasi Mengkoordinir kegiatan Instansi DepHub	Petugas PPLB Kepala Pos Instansi Departemen Perhubungan	R. rapat R. Instansi DepHub
Staf Instansi Departemen Perhubungan	Pemeriksaan kendaraan pelintas batas	Staf Inst. Dephub, pelintas batas (kendaraan)	R. Instansi DepHub, r. pemeriksaan
Kepala Pos Instansi Satlantas	Rapat koordinasi Mengkoordinir kegiatan Instansi Satlantas	Petugas PPLB Kepala Pos Instansi Satlantas	R. rapat R. Instansi Satlantas
Staf Instansi Satlantas	Pemeriksaan Satlantas pelintas batas	Staf Inst. Satlantas, pelintas batas (kendaraan)	R. Instansi Satlantas, r. pemeriksaan kendaraan
Kepala Pos Instansi Asuransi	Rapat koordinasi Mengkoordinir kegiatan Instansi asuransi	Petugas PPLB Kepala Pos Instansi Asuransi	R. rapat R. Instansi Asuransi
Staf Instansi Asuransi	Pengurusan asuransi pelintas batas	Staf Instansi Asuransi, pelintas batas	R. Instansi Asuransi, r. pengurusan asuransi
Kepala Pos Instansi Pajak	Rapat koordinasi Mengkoordinir Instansi Pajak	Petugas PPLB Kepala Pos Instansi Pajak	R. rapat R. Instansi Pajak
Staf Instansi Pajak	Pengurusan Pajak pelintas batas	Staf Instansi Pajak, pelintas batas	R. Instansi Pajak, R. pengurusan pajak
	Rapat koordinasi	Petugas PPLB	R. rapat

b. Hubungan Antara Pelaku, Kegiatan dan Kebutuhan Ruang dalam

Kegiatan non Formal

Untuk melihat kegiatan non formal yang terjadi di PPLB, maka terlebih dahulu diuraikan pelaku-pelaku PPLB:

1) Petugas/pengelola PPLB

- a) Petugas yang berkaitan dengan prosedur pemeriksaan.
- b) Penjual jasa: pengangkut barang, pengelola kantin, dll.

2) Pelintas batas

- a) Orang: masyarakat tradisional (penduduk kawasan perbatasan), masyarakat non tradisional (penduduk bukan kawasan perbatasan).
- b) Barang: barang-barang perdagangan, barang yang dibawa pelintas batas orang.
- c) Kendaraan: pribadi, umum (bis), pengangkut barang perdagangan.

3) Pelaku yang secara tidak langsung terkait dengan PPLB

- a) Kendaraan penjemput/pengantar: umum, pribadi.
- b) Orang: penjemput/pengantar.

Kegiatan yang terjadi di PPLB sesuai dengan masing-masing pelakunya memerlukan wadah berupa ruang. Dibawah ini tertera kegiatan yang berlangsung di PPLB berdasarkan pelaku, serta kebutuhan ruang atas kegiatan yang terjadi tersebut, dengan penekanan uraian pada kegiatan non formal.

Tabel 3.2. Kebutuhan Ruang Untuk Mewadahi Kegiatan non Formal di PPLB

PELAKU	KEGIATAN	RUANG
Petugas PPLB	-memasuki terminal -melakukan pekerjaan sesuai bidangnya -istirahat/kebutuhan umum	-r. parkir kendaraan -r. kerja -kantin, lavatory, ruang ibadah
Koordinator PPLB	-datang -mengkoordinir instansi yang ada di PPLB -istirahat/kebutuhan umum	-parkir kendaraan -r. kerja -kantin, lavatory, ibadah
Sekretaris Koordinator PPLB	-datang -melakukan pekerjaan -istirahat/kebutuhan umum	-parkir kendaraan -r. kerja -kantin, lavatory, ibadah
Pengelola Jasa	-datang -mengelola jasa makanan dan minuman -berdagang cinderamata/ barang lainnya -menunggu pekerjaan (mengangkut barang) -jasa mengangkut barang -jasa telekomunikasi -jasa keuangan dan perbankan -istirahat/kebutuhan umum	-parkir kendaraan -kantin -toko/kantin -r. tunggu -sirkulasi pengangkut barang -r. komunikasi -r. kantor bank -kantin, lavatory, mushala
Pengantar/ penjemput (orang dan kendaraan)	-datang -menunggu -istirahat/kebutuhan umum	-parkir kendaraan -r.tunggu -kantin, lavatory, mushala
Pelintas Batas Orang	Keluar wilayah -datang -istirahat/kebutuhan umum -pembayaran/kelengkapan administrasi -pemeriksaan -keluar wilayah Masuk wilayah	-Kantin, lavatory, r.ibadah, dll -Dinas Pajak, Bank -r. pemeriksaan, r. tunggu pemeriksaan
	-datang -pemeriksaan -istirahat/kebutuhan umum, belanja -berangkat	-r. pemeriksaan, r. tunggu pemeriksaan -Kantin, lavatory, r.ibadah, toko cinderamata,warpostel, dll
Pelintas Batas Barang	-datang -pemeriksaan	-r. pemeriksaan, r. tunggu pemeriksaan, r. penyimpanan, tempat pemusnahan.
Pelintas Batas Kendaraan	-datang -pemeriksaan	-r. pemeriksaan, r. tunggu pemeriksaan

c. Kebutuhan Ruang Dibandingkan Dengan Fasilitas Yang Ada, Karena

Perkembangan Fungsi PPLB

Dengan berkembangnya fungsi PPLB menjadi Pos Pemeriksaan lalulintas internasional, jenis pelintas batas pun bertambah. Pertambahan pelaku membawa akibat pada bertambahnya kegiatan. Ruang-ruang untuk mewadahi kegiatan tersebut akan semakin berkembang pula.

Untuk mengetahui kebutuhan ruang/fasilitas apa yang perlu dilengkapi dapat dengan jalan membandingkan kebutuhan ruang (fasilitas-fasilitas) berdasarkan kegiatan yang baru, dan ruang-ruang/fasilitas yang ada sekarang di PPLB.

Tabel 3.3. menguraikan kebutuhan ruang berdasarkan kegiatan yang ada dengan fasilitas yang tersedia di PPLB. Perbandingan tersebut akan menunjukkan fasilitas apa saja yang perlu dilengkapi.

Tabel 3.3. Perbandingan Kebutuhan Ruang dan Fasilitas yang Telah Ada di PPLB

KEBUTUHAN RUANG	FASILITAS YANG ADA
R. Instansi Bea dan Cukai	X
R. Instansi Imigrasi	X
R. Instansi Karantina	
Gudang Penyimpanan	X
Tempat Pemusnahan	
Laboratorium	
R. Dep. Hub	
R. Asuransi	Menjadi satu dengan bank
R. Sattanas	
R. Koordinator	X
Sirkulasi Pengangkut Barang	
Sirkulasi Pelintas Batas	X
R. Tunggu Pengangkut Barang	
R. Tunggu Penjemput/pengantar Pelintas Batas	
Warpostel	
Bank	Menjadi satu dengan asuransi
R. Dinas pajak	
R. Informasi Pariwisata	
R. Ibadah	X
Toko Cenderamata	
Kantin	X

Dengan melihat tabel diatas, maka kebutuhan ruang tambahan di

PPLB adalah:

1. R. Instansi Karantina
2. Tempat pemusnahan
3. Laboratorium
4. R. Departemen Perhubungan
5. R. Satlantas
6. Sirkulasi pengangkut barang
7. Ruang tunggu pengangkut barang
8. Ruang tunggu penjemput/pengantar pelintas batas
9. Warpostel
10. Ruang Dinas Pajak
11. Ruang informasi Pariwisata
12. Toko Cenderamata

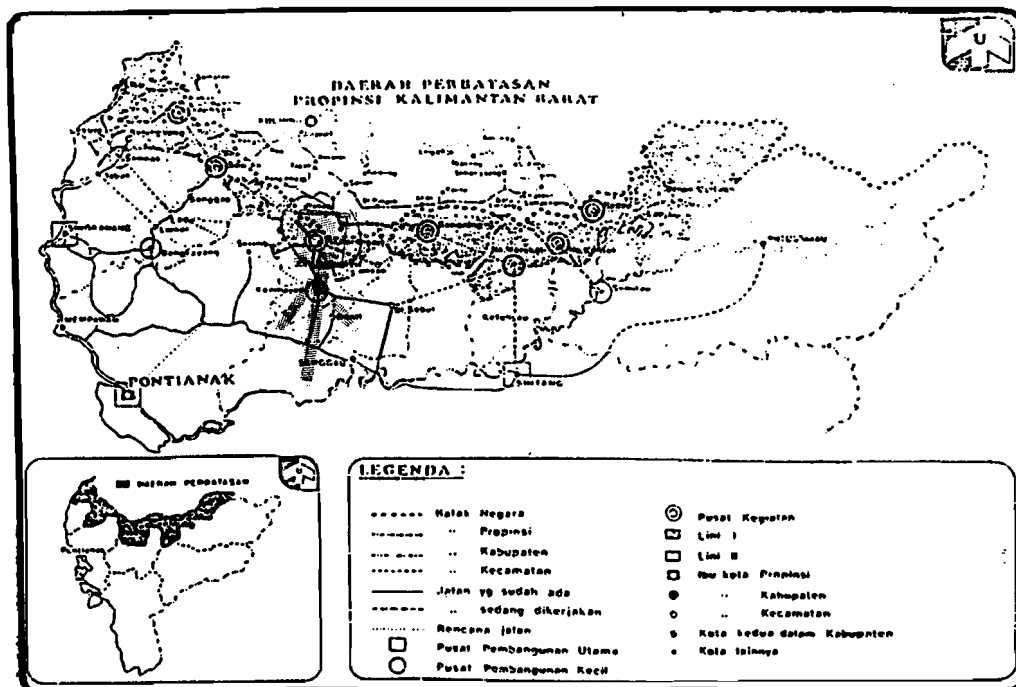
C. PENATAAN RUANG-RUANG PPLB

Penataan ruang-ruang adalah mengatur penempatan dan perletakan ruang-ruang baik itu pada zone tertentu atau terhadap lokasi dan site. Dalam hal ini, ruang-ruang di PPLB dikelompokkan berdasar jenis kegiatan yang sama dan penggunaan waktu yang relatif sama pada masing-masing kegiatan.

1. Lokasi Dan Site

Dilihat dari letak lokasi dan sitenya, PPLB berada di poros jalan utama Kalimantan Barat-Sarawak. Jika dilihat dari fungsinya sebagai tempat pemeriksaan lalulintas internasional, maka

“penghadangan” lalu lintas akan tepat langsung berfungsi. Sehingga setiap pelintas batas pasti melewati PPLB ini. Dengan kata lain akses pencapaian ke PPLB adalah langsung dan mudah.



Gb. 3.1. Lokasi PPLB Terhadap Jalan Utama Kalimantan Barat - Sarawak

2. Pengelompokan Ruang Berdasar Jenis Kegiatan

Dilihat dari jenis kegiatannya, maka ruang-ruang yang dikelompokkan adalah:

a. Kegiatan utama: kegiatan proses pemeriksaan lintas batas

- 1) R. Bea dan Cukai
- 2) R. Imigrasi
- 3) R. Karantina
- 4) R. Departemen Perhubungan
- 5) R. Asuransi
- 6) R. Satlantas
- 7) R. Karantina SDA

b. Kegiatan Penunjang: kegiatan yang menunjang proses pemeriksaan di

PPLB

Kegiatan yang sangat erat dengan kegiatan utama (para petugas PPLB), waktu berhubungan adalah secepat mungkin.

- 1) R. Koordinator
- 2) R. Sekretaris dan ruang tunggu
- 3) R. Rapat Koordinasi

Ruang yang hubungannya erat dengan administrasi keluar wilayah, namun memerlukan proses waktu yang agak panjang. Kegiatan ini dapat dilakukan di PPLB maupun di kota besar yang mengurus fiskal keberangkatan keluar wilayah, sehingga perletakan ruang tersendiri.

- 4) R. Instansi Pajak

Ruang yang relatif tidak erat dengan kegiatan PPLB, waktu berhubungan memerlukan waktu yang panjang.

- 5) R. Laboratorium
- 6) R. Tunggu proses pemeriksaan laboratorium

c. Kegiatan Tambahan: kegiatan diluar kegiatan utama. Umumnya bersi-

fat servis, jasa, relaksasi dengan penggunaan waktu relatif panjang

- 1) R. Warpostel
- 2) R. Informasi Pariwisata
- 3) Toko Cenderamata
- 4) R. Ibadah
- 5) Bank
- 6) Kantin
- 7) Lavatory
- 8) R. Tunggu

3. Gubahan Massa

Untuk menentukan apakah massa yang diperlukan cukup massa tunggal atau memerlukan massa jamak dapat dengan cara:

- a. Tuntutan fungsi, yaitu jenis kegiatan yang diwadahi, tuntutan kedinamisan, dan fleksibilitas pengembangan.

Berdasarkan analisis jenis kegiatan yang terjadi di PPLB, terdapat tiga jenis kegiatan. Kegiatan utama adalah kegiatan yang mutlak memerlukan privacy tinggi, dimana pelaku kegiatan tersebut hanyalah pelaku yang terlibat langsung dalam kegiatan pemeriksaan lintas batas. Mengingat kecepatan proses kegiatan adalah hal mendasar, maka hubungan ruang yang berdekatan akan berpengaruh pada keefisienan waktu pencapaian. Selain itu integritas antar kegiatan-kegiatan utama akan menunjang pola kerja. Maka untuk kegiatan utama, diperlukan satu massa tersendiri.

Untuk kegiatan penunjang yang berhubungan secara langsung pula dengan kegiatan utama PPLB seperti ruang koordinator yang berfungsi mengkoordinir dan mengawasi kegiatan dapat diwadahi pada bangunan kegiatan utama.

Kegiatan pembayaran fiskal yang dapat dilakukan di tempat lain, dan memerlukan waktu yang lebih panjang dari rata-rata kegiatan utama, maka perletakan ruang terpisah.

Kegiatan penunjang seperti laboratorium sesuai dengan sifatnya, lebih memerlukan privacy dan waktu proses yang relatif lama, diwadahi pada bangunan tersendiri.

Kegiatan tambahan yang lebih bersifat relaksasi dan rekreatif, berbeda dari kedua sifat kegiatan lainnya diwadahi pada bangunan tersendiri pula.

- b. Integritas dan penyesuaian dengan alan, yaitu respon terhadap kondisi topografi, kemudahan dalam memasukkan unsur alan, tuntutan skala manusia.

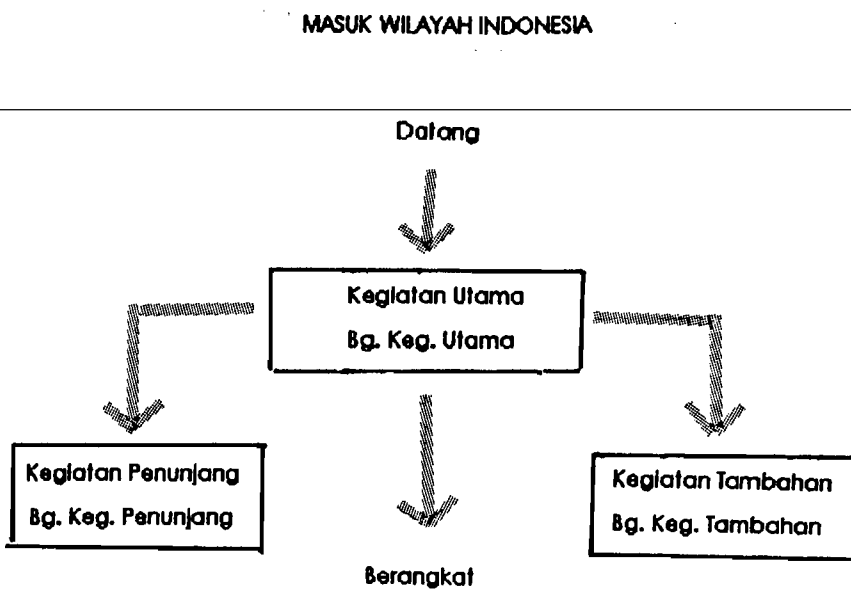
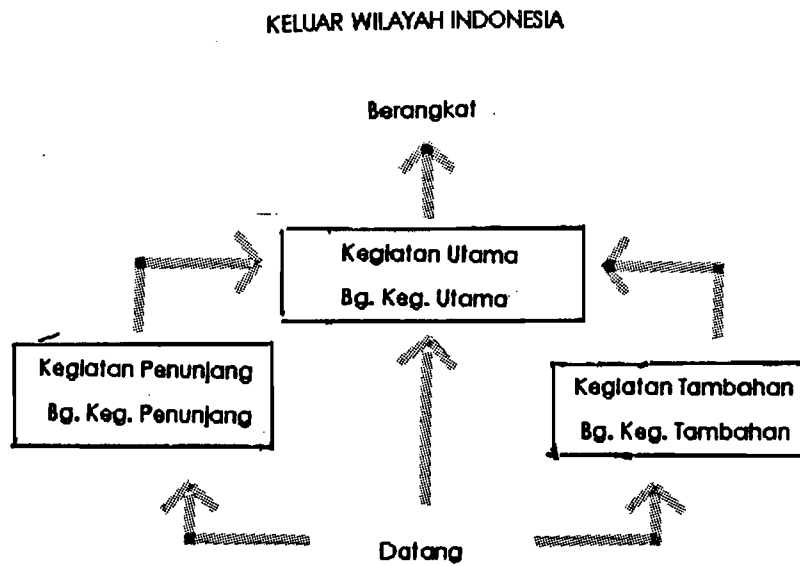
Kondisi fisiografi site relatif berbukit-bukit. Untuk keadaan seperti ini, massa jamak akan lebih mudah menyesuaikan diri.

Dengan demikian di PPLB ini diperlukan massa jamak.

Didasarkan atas pengelompokan jenis kegiatan tersebut dan adanya massa jamak, yang berpengaruh pada pengelompokan ruang, maka secara keseluruhan pola ruang terbagi atas pola ruang luar yang memperlihatkan zone-zone menurut jenis kegiatan dan pola ruang dalam yang memperlihatkan pengaturan yang lebih spesifik.

4. Pola Ruang Luar

Pengaturan pola ruang luar dilihat dari kegiatan pelaku PPLB sewaktu berada di lokasi, yang terbagi ke dalam dua kategori yaitu pelintas batas keluar wilayah Indonesia, dan pelintas batas memasuki wilayah Indonesia



5. Pola Ruang Dalam

Pola ruang dalam dilihat pada masing-masing jenis kegiatan

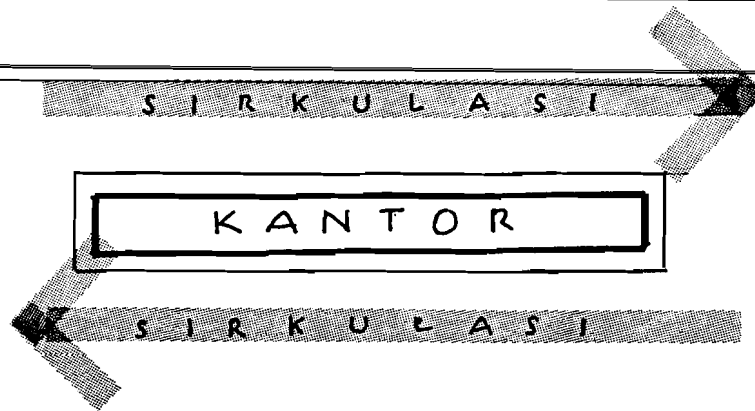
a. Bangunan Kegiatan Utama

Pada kegiatan utama ada kegiatan proses pemeriksaan keluar wilayah Indonesia dan masuk wilayah Indonesia, dimana semua kegiatan itu mempunyai urutan-urutan sesuai prosedur yang tertera pada bab II.

Kegiatan pemeriksaan berjalan mengikuti urutannya agar pemeriksaan berjalan sesuai prosedur dan lancar. Dengan adanya urutan, maka pengaturan ruang sebagai wadah masing-masing kegiatan berurutan sehingga tercipta sirkulasi mengalir. Kecepatan yang sama pada setiap pemeriksaan menyebabkan kelancaran proses. Jika ada satu proses yang mempunyai rentang jarak perbedaan yang jauh dari urutan-urutan tersebut, ataupun jenis kegiatan yang berlainan sifatnya, akan mengganggu urutan-urutan yang terjadi. Adanya kemacetan pada satu unsur, mempengaruhi panjang urutan/antrian proses dibelakangnya. Sehingga penataan ruang pun dikelompokkan berdasarkan kegiatan yang sejenis dan dalam penggunaan waktu yang relatif sama. Penataan ruang-ruang yang berdekatan/berdampingan akan mempengaruhi waktu tempuh dari satu ruang ke ruang lainnya, dalam arti ada penghematan waktu.

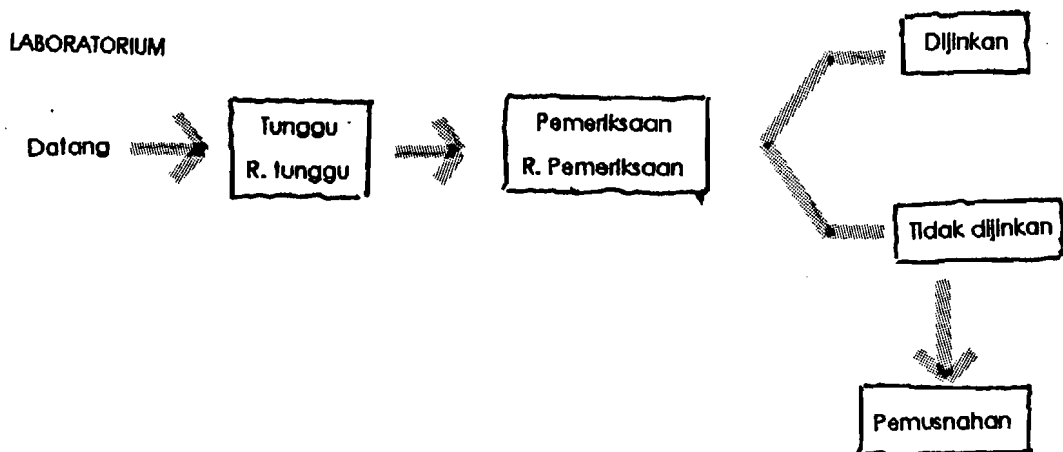
Selain itu ada interaksi yang kuat antara pelintas batas dengan pemeriksa, otomatis pula berpengaruh pada interaksi ruang pemeriksaan dengan ruang petugas.

Dengan demikian pola ruang-ruang kantor adalah linier yang diorganisir sirkulasi di kedua sisinya.



b. Bangunan Kegiatan Penunjang

- Kegiatan yang erat dengan kegiatan utama: walaupun merupakan kegiatan penunjang, namun berhubungan sangat erat (dalam pengawasan proses pemeriksaan), sehingga dijadikan satu dalam bangunan kegiatan utama, namun tidak mengganggu/memutus urutan proses pemeriksaan. Besaran masing-masing ruang berbeda, sedangkan arahan visuil ke kedua sisi pemeriksaan (keluar dan masuk wilayah), memudahkan pengawasan kegiatan di kedua sisi tersebut. Alternatif perletakan adalah dilantai dua.
- Kegiatan penunjang yang tidak terlalu erat dengan kegiatan utama dan memerlukan waktu lama untuk proses kegiatan. Pola kegiatan yang terjadi adalah:

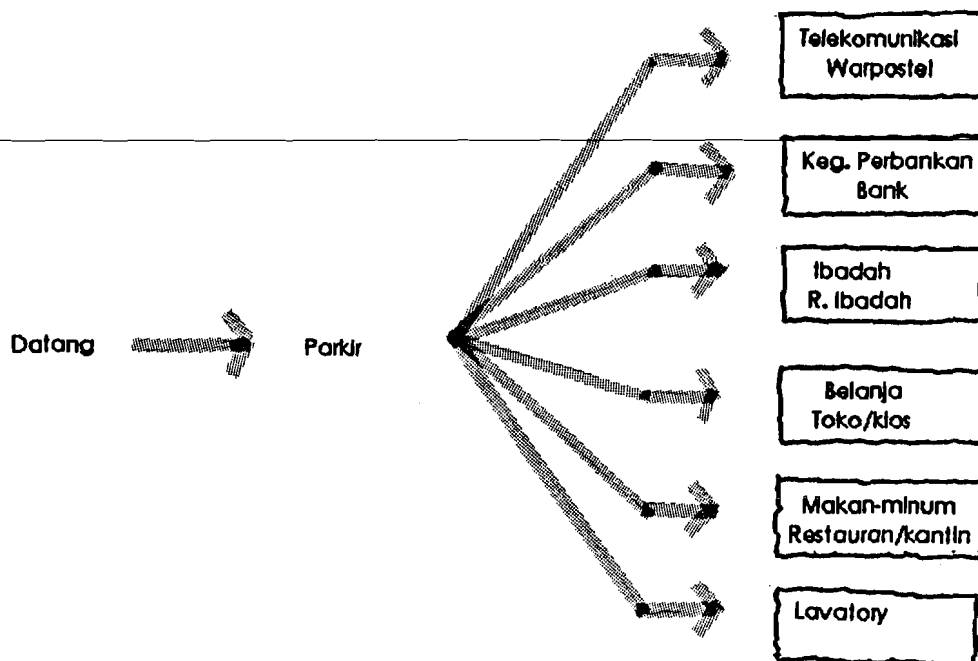


PAJAK



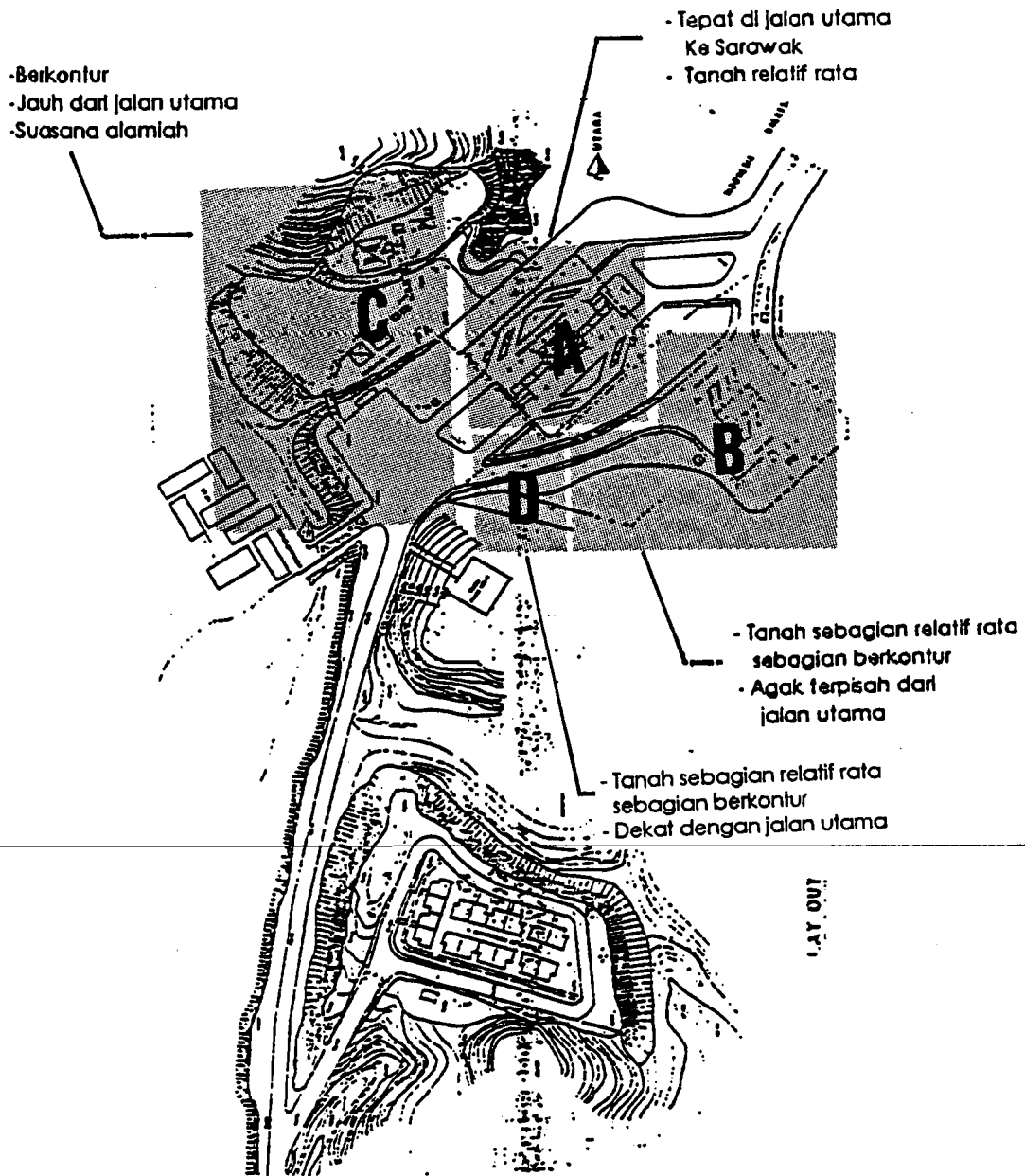
c. Kegiatan tambahan: semua kegiatan bersifat sama, dalam artian tidak ada ketentuan satu kegiatan mendahului kegiatan lainnya. Dalam hal ini hirarki ruang adalah sama. Pola kegiatan pelaku adalah datang dan langsung menyebar menurut kebutuhannya masing-masing. Semua ruang diorganisir oleh kesamaan visuil, yaitu arah kedatangan pengunjung, dalam hal ini, kedatangan pengunjung dipusatkan dari arah parkir kendaraan.

Kegiatan yang mempunyai hubungan erat dengan kegiatan utama, dapat dijadikan satu pada bangunan utama namun tidak mengganggu kegiatan dengan alternatif perletakan di lantai dua. Ataupun perletakan sedekat mungkin dengan bangunan utama.



6. Penzoningan

Penzoningan ruang-ruang berdasarkan pengelompokan kegiatan dan faktor-faktor khusus yang mendukung.



3.5. Analisa Zone

a. Zone Kegiatan Utama:

- 1) Akses langsung ke jalan raya: pelaku pada PPLB ketika datang dapat langsung menuju ke kegiatan utama jika merasa tidak perlu melakukan kegiatan tambahan.
- 2) Langsung mengakses ke Sarawak: sesuai dengan fungsinya, yaitu menyaring langsung hal-hal yang masuk dari negara tetangga.
- 3) Keadaan tanah relatif rata memudahkan pergerakan kendaraan (terutama kendaraan-kendaraan besar), dan pergerakan yang mudah/ringan bagi orang yang berjalan kaki.

Maka alternatif zone adalah: A

b. Zone Kegiatan Penunjang:

- 1) Dekat dengan zone utama
- 2) Kemudahan hubungan dengan kegiatan utama
- 3) Bagi Laboratorium memerlukan privacy khusus

Maka alternatif zone adalah B

c. Zone Kegiatan Tambahan

Sifat kegiatan adalah rekreatif, santai dan dinamis.

Suasana alamiah mendukung kegiatan beristirahat.

Alternatif zone adalah C .D

D. BANGUNAN PPLB**1. Penampilan Bangunan**

Pada bangunan utama kegiatan yang berlangsung adalah kegiatan formal, sehingga cerminan bangunan berkarakter formal. Pelaku kegiatan antara lain adalah kendaraan, sehingga faktor polusi dalam ruangan sangat besar. Bukaannya lebar pada bangunan untuk me-

masukkan penghawaan alami sebanyak mungkin akan sangat mendukung sirkulasi udara. Salah satu pelaku pada bangunan utama adalah kendaraan-kendaraan besar seperti bis, maka ketinggian bangunan harus dapat mengantisipasi pelaku ini.

Pada bangunan lainnya, yaitu bangunan yang berfungsi mewadahi kegiatan tambahan bersifat rekreatif dan komersil memerlukan view yang cukup banyak terhadap lingkungan sekitar mempengaruhi bentuk dinding yang memungkinkan perolehan view yang banyak. Untuk bangunan toko souvenir, unsur-unsur kedaerahan setempat dapat dimunculkan sebagai unsur komersil dan pencerminan budaya yang diperkenalkan. Selain itu sebagai pintu gerbang memasuki wilayah Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, penerapan arsitektur daerah akan mendukung pengenalan wilayah.

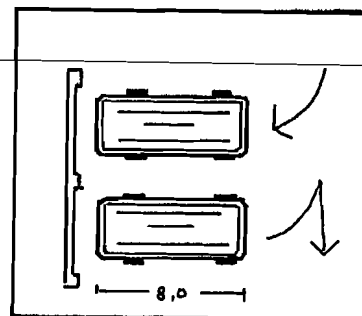
2. Faktor Fisik Jalur Pergerakan

a. Di Dalam Bangunan Utama

1) Sirkulasi Pemeriksaan Kendaraan (bis)

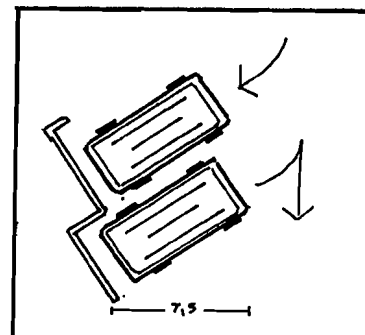
Alternatif 1

- Lebar ruang sirkulasi besar
- Perlu waktu untuk pergerakan bis
- Ruang relatif tidak panjang



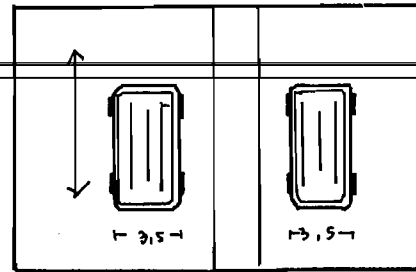
Alternatif 2

- Lebar ruang sirkulasi besar
- Ruang agak panjang
- Perlu waktu untuk pergerakan bis



Alternatif 3

- Lebar ruang sirkulasi kecil
- Ruang relatif panjang
- Pergerakan bis langsung

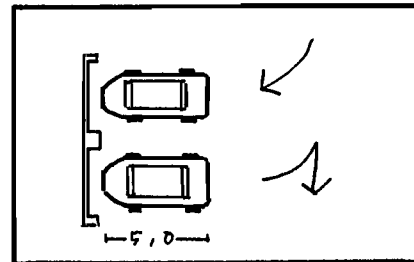


Karena PPLB erat kaitannya dengan masalah waktu, maka yang dipilih adalah alternatif 3, dengan lebar 2 jajaran bis.

2) Sirkulasi Pemeriksaan Kendaraan (kecil)

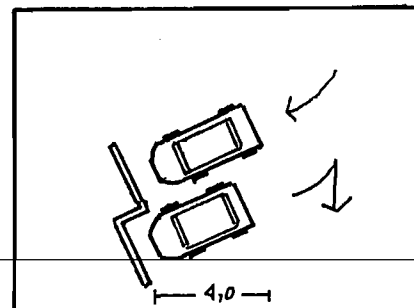
Alternatif 1

- Lebar ruang sirkulasi besar
- Perlu waktu untuk pergerakan
- Ruang relatif tidak panjang



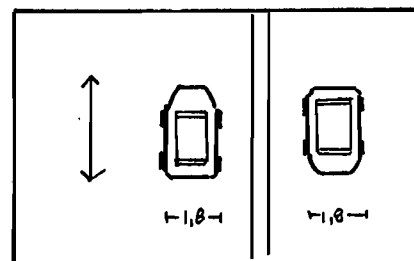
Alternatif 2

- Lebar ruang sirkulasi besar
- Ruang agak panjang
- Perlu waktu untuk pergerakan



Alternatif 3

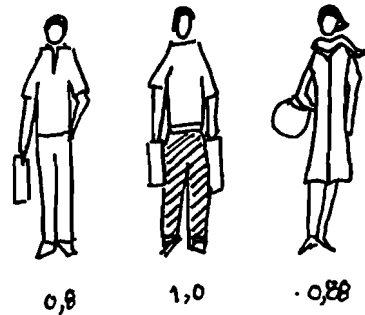
- Lebar ruang sirkulasi kecil
- Ruang relatif panjang
- Pergerakan langsung



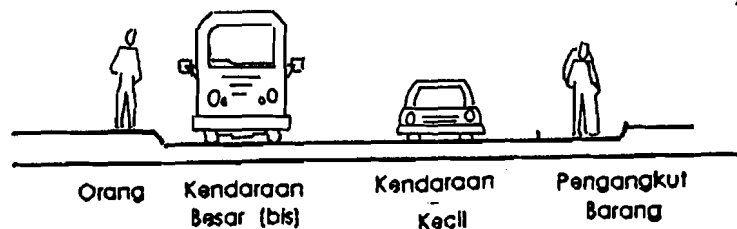
Karena PPLB erat kaitannya dengan masalah waktu, maka yang dipilih adalah alternatif 3, dengan lebar 2 jajaran mobil.

3) Sirkulasi orang

Sirkulasi berbentuk mengalir sesuai urutan proses pemeriksaan (bea cukai dan imigrasi), maka lebar ruang adalah sesuai dengan ukuran lintasan 1 orang dengan membawa barang. Untuk pemeriksaan bea cukai terbagi atas red line dan green line.



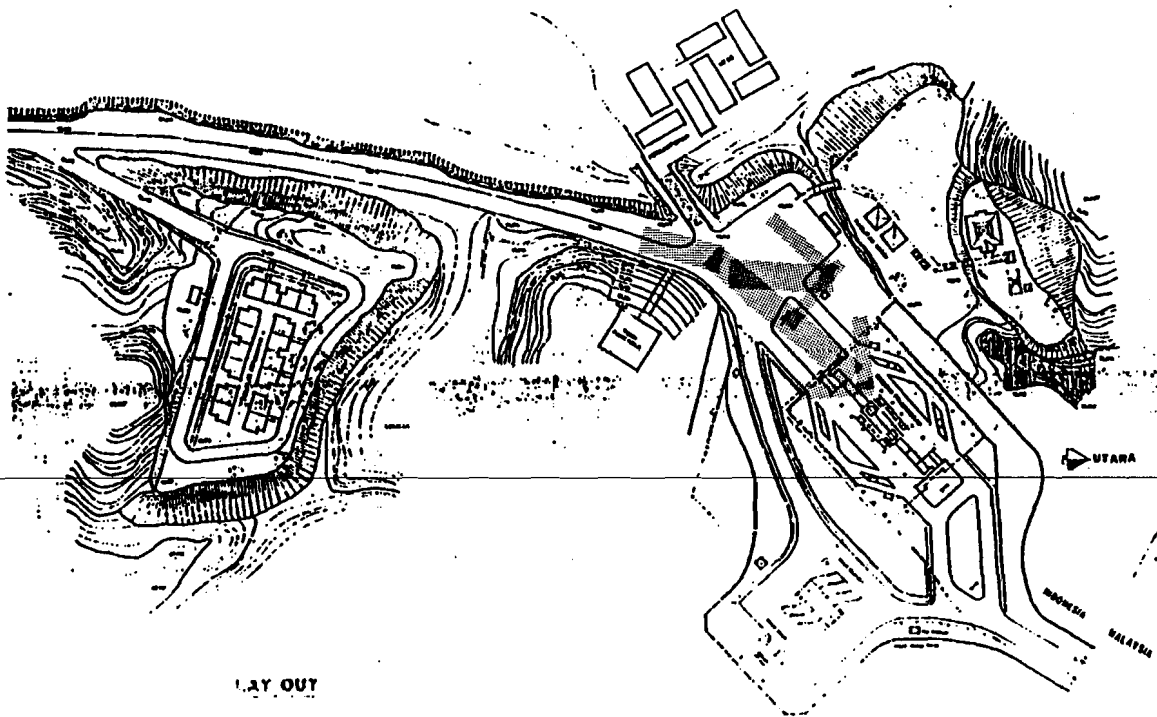
- 4) Ada dua jalur sirkulasi utama, yaitu jalur sirkulasi masuk wilayah Indonesia, dan jalur sirkulasi keluar wilayah Indonesia.
- 5) Pada masing-masing jalur tersebut disediakan lintasan balik bagi pelintas batas yang tidak memenuhi syarat melintas batas.
- 6) Ada pemisahan sirkulasi menurut jenis pelintas batas, dan dibagi lagi menurut jumlah petugas pemeriksa.



7) Karena tingginya faktor polusi dan memungkinkan view yang banyak untuk kemudahan pengawasan, ruang sirkulasi tidak diberi pembatas dinding masive.

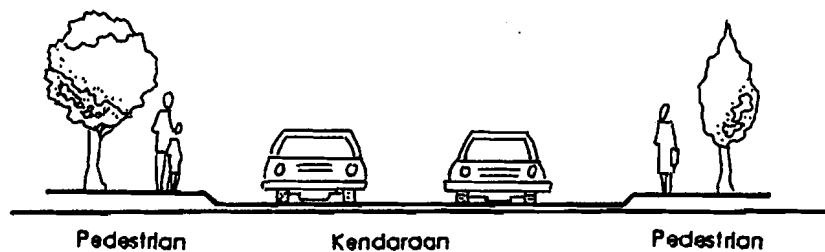
b. Di Luar Bangunan Utama

- 1) Percabangan pencapaian, ke gedung utama dan ke zone kegiatan tambahan untuk memisahkan kegiatan pelaku langsung ke kegiatan utama, atau ke kegiatan tambahan/lainnya.



2) Jalur pemeriksaan barang ekspor dan impor yang memerlukan penanganan yang lebih khusus, tidak mengganggu pemeriksaan biasa dalam bangunan utama. Lokasi gudang barang yang lama tetap digunakan, karena kemudahan akses langsung masuk dan keluar wilayah.

3) Pemisahan jalur pedestrian dan kendaraan



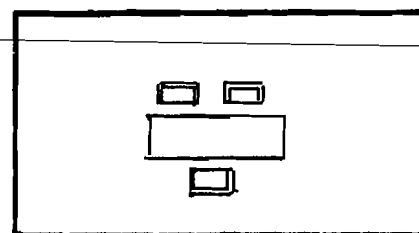
3. Besaran Ruang

a. Bangunan Kegiatan Utama

Bangunan utama mewadahi kegiatan utama PPLB.

1) Ruang Petugas

Susunan 1 unit meja kerja berikut standar keluasaan adalah 2m-2,75m. Sirkulasi 20%



Berdasar analisa perhitungan diperlukan 17 petugas (instansi Bea dan Cukai, Imigrasi, Karantina, Asuransi), ditambah dengan seorang kepala instansi, dan untuk dua sisi pemeriksaan: $(n \times a) + 20\% n a = (18 \times 2,5 \text{m}^2) + 20\% \times 18 \times 2,5 \text{m}^2 = 54 \text{m}^2$

Jika petugas 3 orang dengan seorang kepala instansi:

$$(4 \times 2,5\text{m}^2) + 20\% \times 4 \times 2,5\text{m}^2 = 12\text{m}^2$$

Untuk r. instansi pajak yang melayani pembayaran fiskal pelintas batas keluar wilayah, petugas yang diperlukan 10 orang, dengan seorang kepala instansi, besaran ruang kerja:

$$(n \times a) + 20\% \times n \times a = (11 \times 2,5\text{m}^2) + 20\% \times 11 \times 2,5\text{m}^2 = 33\text{m}^2$$

2) Meja Pemeriksaan :

- Surat-surat keimigrasian untuk 10 petugas:

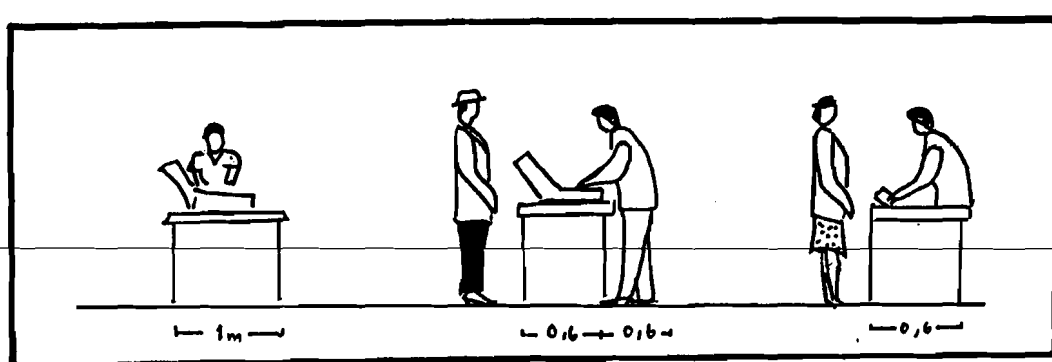
$$10 \text{ orang} \times 1\text{m} \times 1,2\text{m} = 12\text{m}^2$$

$$2 \text{ unit} = 24\text{m}^2$$

- Barang Bawaan Pelintas Batas untuk 10 petugas:

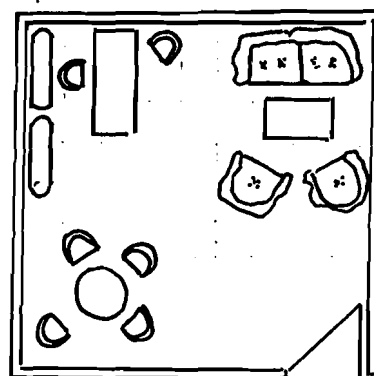
$$10 \text{ orang} \times 1\text{m} \times 1,2\text{m} = 12\text{m}^2$$

$$2 \text{ unit} = 24\text{m}^2$$



3) R. Koordinator PPLB

- R. Koordinator, 1 unit meja kerja 2m-2,75, 1 unit meja kursi tamu, 1 unit meja diskusi = 25m²



-
- 1 Sekretaris, 1 unit meja kerja, 1 unit lemari arsip, 1 unit kursi tamu, luas $10m^2$
-

4) R. Rapat

Untuk 7 instansi, pada kedua sisi, masing-masing dengan 2 orang wakil, dan 1 orang sekretaris serta 1 orang koordinator, dengan standar 1 orang $1,5-2m^2$, ruang yang diperlukan:

$$(nxa)+20\%na = (30 \times 2m^2) + 20\% \times 30 \times 2m^2 = 72m^2$$

Untuk ruang rapat besar dengan peserta 100 orang, diperlukan ruang: $(nxa)+20\%na = (100 \times 2m^2) + 20\% \times 100 \times 2m^2 = 240m^2$

b. Bangunan Kegiatan Penunjang

1) Laboratorium

- R. Tamu/lobby penerima untuk 2 petugas dengan satu set kursi tamu: $9m^2$.
- Penggunaan modul segiempat sana sisi dibandingkan persegi panjang memberikan keleluasaan bagi pengaturan meja kursi.
- Diasumsikan 4 petugas sesuai jenis pemeriksaan menggunakan peralatan bersama = $24,5m^2$.
- Ruang khusus untuk pemeriksaan menggunakan bahan kimia, untuk 1-2 orang = $6m^2$.
- Ruang tunggu bagi flora-fauna yang akan diperiksa = $16m^2$.
- Ruang flora dan fauna yang telah disortir = $16m^2$.

c. Bangunan Kegiatan Tambahan

1) R. Tunggu Pengantar/penjemput

Ruang memungkinkan orang yang menunggu didalamnya dapat dengan leluasa melihat keberangkatan dan kedatangan pelintas batas.

Besaran Ruang Tunggu Penjemput/pengantar bagi:

a) Orang

Diasumsikan jumlah penjemput/pengantar sama dengan jumlah pelintas batas tradisional

yaitu 2.481 orang/hari (dalam 12 jam)

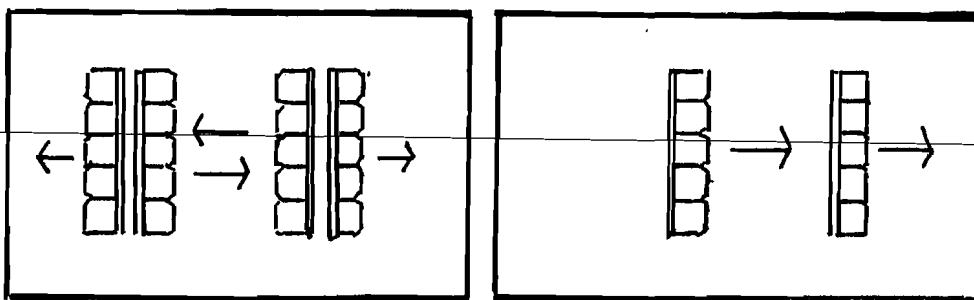
Maka 1 jam adalah : $2.481 \text{ orang} : 12 \text{ jam} = 207 \text{ orang/jam}$

Alternatif 1

- Efisiensi sirkulasi
- View 2 sisi

Alternatif 2

- Sirkulasi pada setiap deret
- View 1 sisi

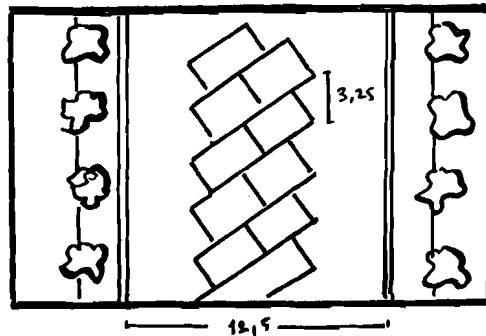


standar kursi duduk dan sirkulasi: 60cmx100cm

$$(207 \times 0,6\text{m}^2) + 20\%(207 \times 0,6\text{m}^2) = 149,4\text{m}^2$$

b) Kendaraan

- Kendaraan pribadi



Diasumsikan $\frac{1}{4}$ dari jumlah pengantar/penjemput, maka ada 52 kendaraan/jam. Dengan 2 sisi parkir $52 : 2 = 26$ kendaraan

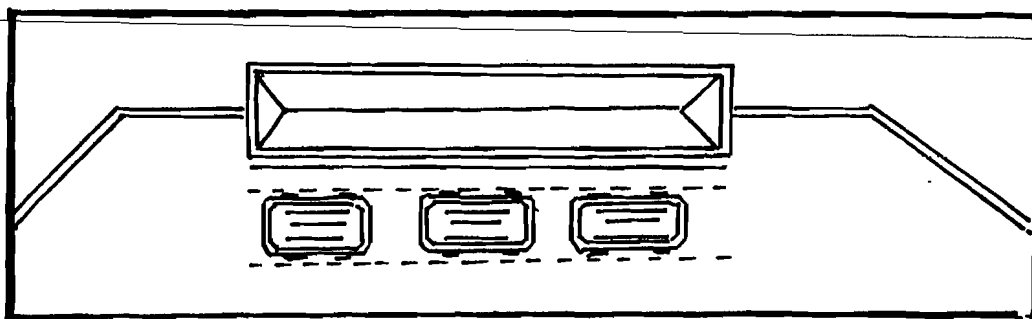
$$3,25\text{m} \times 12,5\text{m} \times 26 = 1056,25\text{m}^2$$

- Minibus

Ruang yang dibutuhkan berbentuk halte bus, dengan jumlah 3 minibus setiap $\frac{1}{2}$ jam : $9\text{m} \times 3\text{m} = 27\text{m}^2$

(r. duduk untuk menunggu bagi 36 orang):

$$(36 \times 0,6\text{m}^2) + 20\%(36 \times 0,6\text{m}^2) = 25,92\text{m}^2$$



2) R. Tunggu Pengangkut Barang

Sebagai ruang yang berfungsi untuk tempat menunggu pekerjaan, para pelaku (pengangkut barang) harus dapat leluasa melihat orang

yang datang yang memerlukan jasanya. Sehingga perletakan ruang yang paling memungkinkan adalah dekat dengan arah kedatangan.

Dengan 30 tenaga kerja, maka besaran yang dibutuhkan:

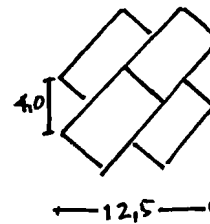
$$(30 \times 0,6m^2) + 20\%(30 \times 0,6m^2) = 21,6m^2$$

3) R. Parkir

- Bis Pelintas Batas

Dengan asumsi selama 1 jam ada 2 bis parkir dan posisi yang sama dengan kendaraan kecil

$$2 \times 4m \times 17,5m = 140m^2$$

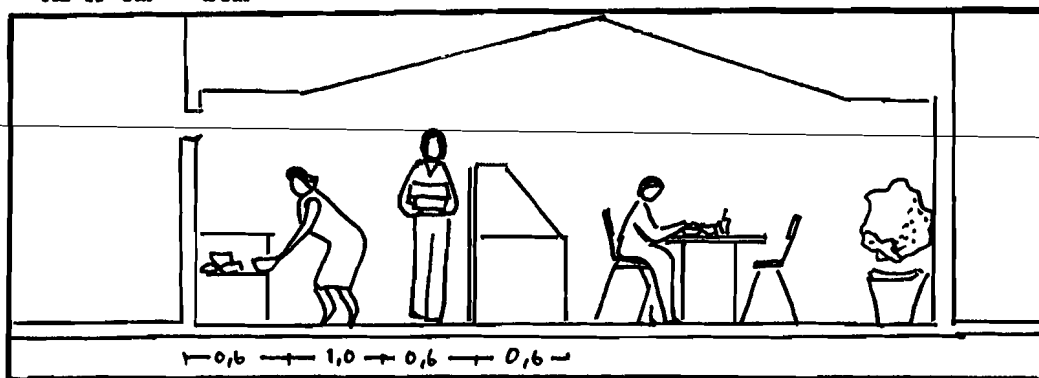


4) Besaran Kantin

Diasumsikan :

- Pelayanan sistem fastfood (swalayan), dengan luasan pantry:

$$3m \times 5m = 15m^2$$



- Pada peak hour (jam makan), semua pelintas batas menggunakan kantin, dengan perhitungan :

Jumlah pelintas batas dalam 12 jam kerja

$$5547 \text{ orang} : 12 \text{ jam} = 462,3 \text{ orang/jam} \quad 463 \text{ orang/jam}$$

- Lama waktu makan dan minum: 30 menit:

$$463 \text{ orang} : 2 = 231,5 \text{ orang} \quad 232 \text{ orang}$$

- 1 unit meja makan terdiri atas 4 kursi dengan standar $3,6\text{m}^2$:

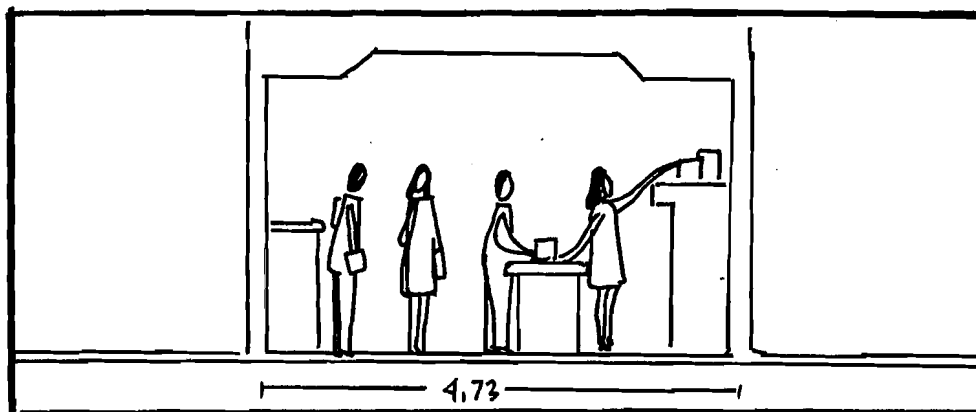
$$232 \text{ orang} : 4 = 58 \text{ unit}$$

$$(58 \text{ unit} \times 3,6\text{m}^2) + 20\% \times 58 \text{ unit} \times 3,6\text{m}^2 = 250,6\text{m}^2$$

5) Besaran Toko Souvenir

- Diasumsikan ada 4 toko masing-masing melayani 10 pembeli

- Dengan ukuran tersebut diperoleh luasan $4,73\text{m} \times 4,73\text{m} = 22,37\text{m}^2$



6) Besaran Warung Telekomunikasi dan Pos

Untuk melayani telegram, interlokal, pengiriman facsimile, pos, yang dilayani 3 petugas

$$\text{- Luas ruang kerja} = 3 \times 1,2\text{m}^2 = 3,6\text{m}^2$$

$$\text{- Luas peralatan komunikasi untuk 2 kbu} = 2 \times 2\text{m}^2 = 4\text{m}^2$$

$$\text{- Luas ruang tunggu untuk 10 orang} : 10 \times 0,6 = 6\text{m}^2$$

$$\text{Total} : (3,6\text{m}^2 + 4\text{m}^2 + 6\text{m}^2) + 20\%(3,6\text{m}^2 + 4\text{m}^2 + 6\text{m}^2) = 16,32\text{m}^2$$

7) Besaran Kantor Informasi Pariwisata

Dilayani 3 orang petugas

- Luas ruang kerja : $3 \times 1,2\text{m}^2 = 3,6\text{m}^2$

- Ruang tunggu 10 orang : $10 \times 0,6\text{m}^2 = 6\text{m}^2$

Total $(6\text{m}^2 + 3,6\text{m}^2) + 20\%(6\text{m}^2 + 3,6\text{m}^2) = 11,52\text{m}^2$

8) Besaran Mushala

- Mushala diasumsikan menampung 50 orang jamaah (1 rit bis)

$(50 \text{ orang} \times 0,75\text{m} \times 1,375\text{m}) + 20\% \times 50 \times 1,375\text{m} \times 0,75\text{m} = 61,88\text{m}^2$

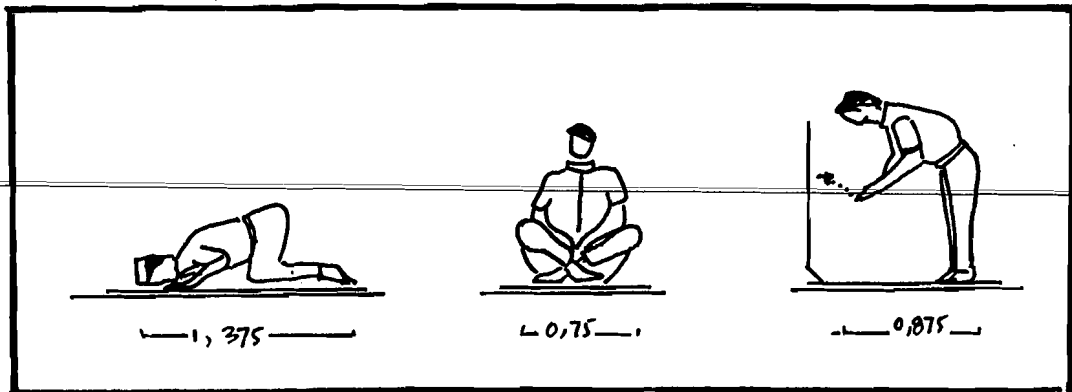
- Ruang wudhu dengan asumsi 5 orang:

$0,6\text{m} \times 5 \text{ orang} \times 8,75\text{m} = 2,625\text{m}^2$

$(2,625\text{m}^2 \times 20\%) + 2,625\text{m}^2 = 3,15\text{m}^2$

Lavatory : $1,5\text{m} \times 1,5\text{m} = 2,25\text{m}^2$

Untuk 2 unit : $10,8\text{m}^2$



9) Besaran Lavatory penumpang

- Diasumsikan 2 unit di bangunan utama, 2 unit di area servis,

- 1 unit dengan 4 wc, 2 wastafel.

- Standard wc 1mx2m, standard wastafel 0,9mx1,5m.

$$\text{Luas 1 unit: } (4 \times 2 \text{m}^2) + (2 \times 13,5 \text{m}^2) + 20\% (4 \times 2 \text{m}^2) + (2 \times 13,5 \text{m}^2) = 0,4 \text{m}^2$$

10) Bank

- Dilayani 3 orang petugas

- Luas ruang kerja : $3 \times 1,2 \text{m}^2 = 3,6 \text{m}^2$

- Ruang tunggu 10 orang : $10 \times 0,6 \text{m}^2 = 6 \text{m}^2$

$$\text{Total } (6 \text{m}^2 + 3,6 \text{m}^2) + 20\% (6 \text{m}^2 + 3,6 \text{m}^2) = 11,52 \text{m}^2$$

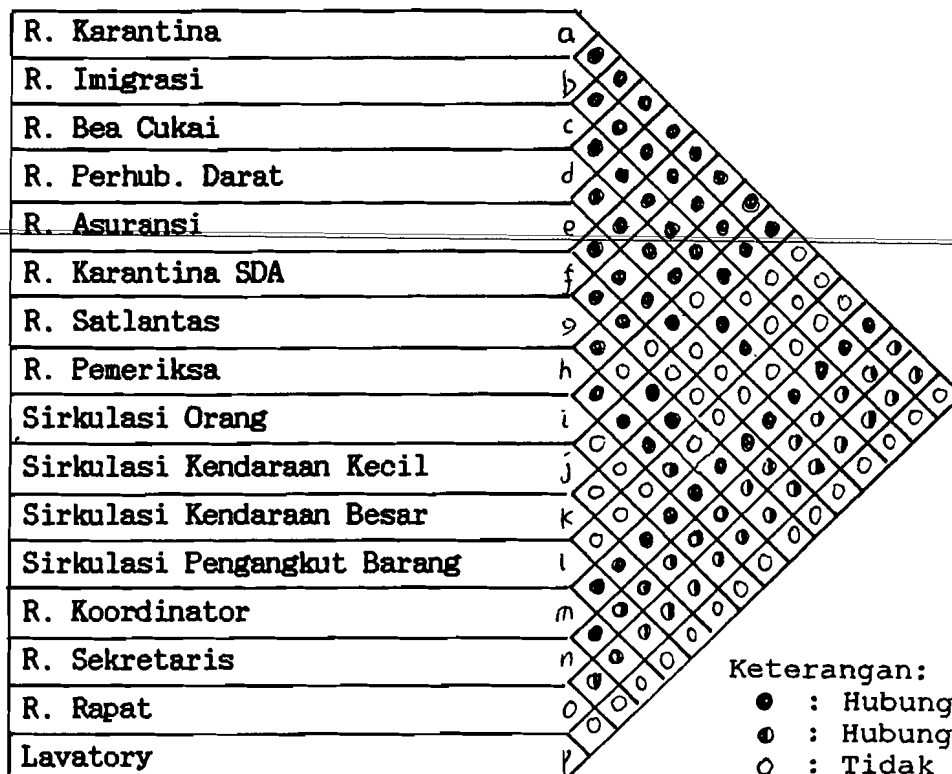
4. Pola Hubungan dan Organisasi Ruang

a. Bangunan Utama

Urutan hubungan ruang berdasarkan urutan proses pemeriksaan:

- Proses Masuk Wilayah Indonesia:

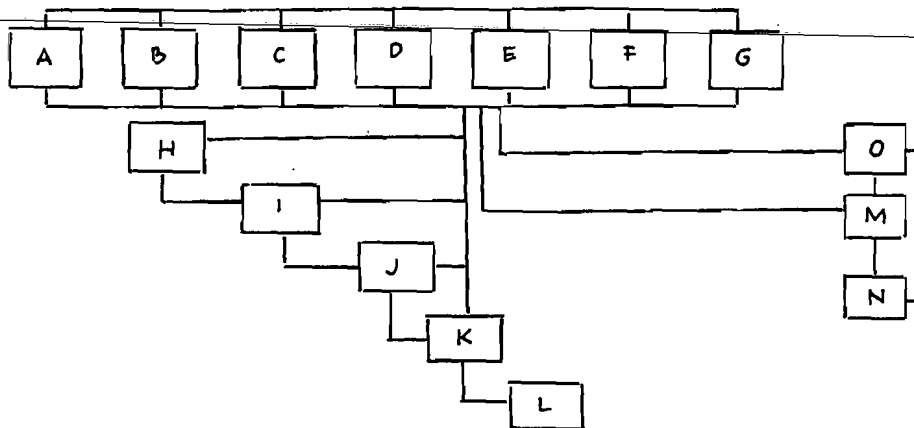
Hubungan Ruang



Keterangan:

- : Hubungan erat
- ◐ : Hubungan tidak erat
- : Tidak ada hubungan

Organisasi Ruang:



- Proses Keluar Wilayah Indonesia

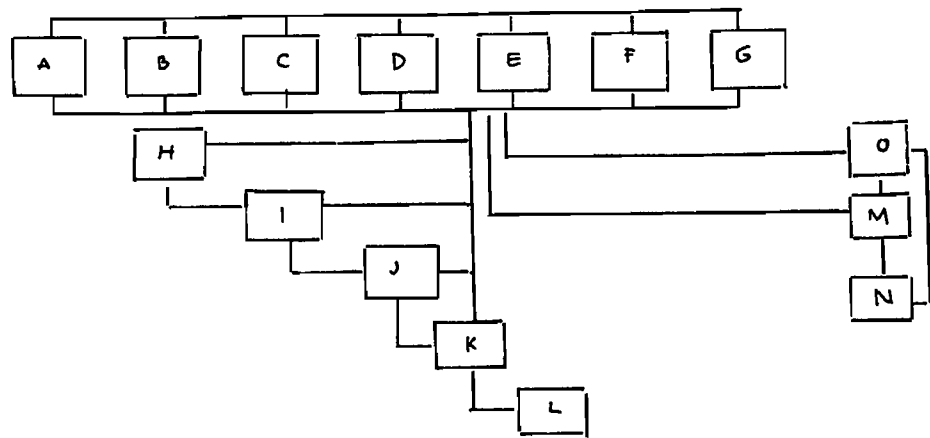
Hubungan Ruang:

R. Perhub. Darat	a
R. Asuransi	b
R. Karantina SDA	c
R. Satlantas	d
R. Karantina	e
R. Bea Cukai	f
R. Imigrasi	g
R. Pemeriksa	h
Sirkulasi Orang	i
Sirkulasi Kendaraan Kecil	j
Sirkulasi Kendaraan Besar	k
Sirkulasi Pengangkut Barang	l
R. Koordinator	m
R. Sekretaris	n
R. Rapat	o
Lavatory	p

Keterangan:

- : Hubungan erat
- ◐ : Hubungan tidak erat
- : Tidak ada hubungan

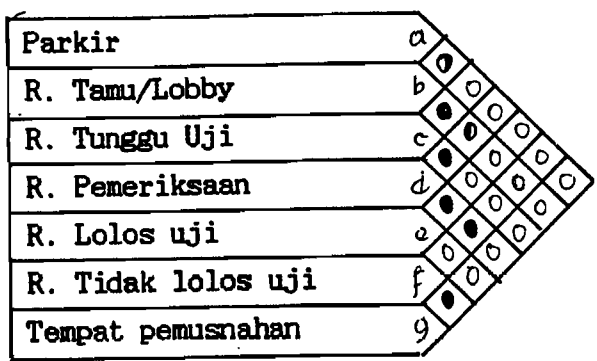
Organisasi Ruang:



b. Bangunan Penunjang

1) Laboratorium

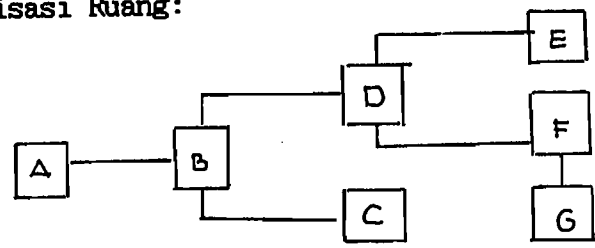
Hubungan Ruang:



Keterangan:

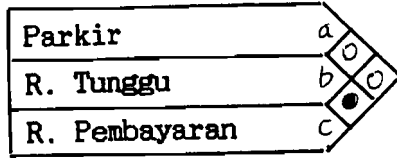
- : Hubungan erat
- : Hubungan tidak erat
- : Tidak ada hubungan

Organisasi Ruang:



2) R. Pajak :

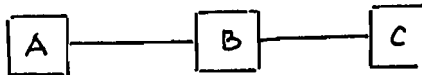
Hubungan ruang:



Keterangan:

- : Hubungan erat
- ◐ : Hubungan tidak erat
- : Tidak ada hubungan

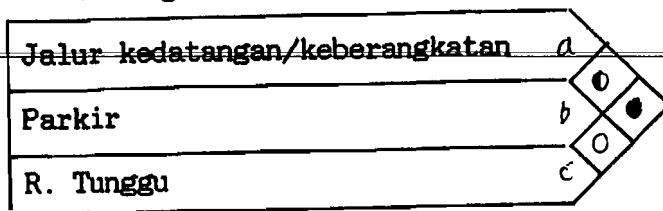
Organisasi ruang :



c. Bangunan Tambahan

1) R. Tunggu Pengantar/Penjemput

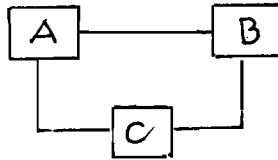
Hubungan ruang:



Keterangan:

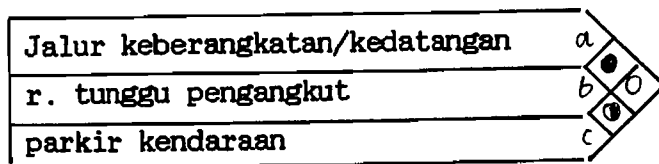
- : Hubungan erat
- ◐ : Hubungan tidak erat
- : Tidak ada hubungan

Organisasi ruang:



2) R. tunggu pengangkut barang

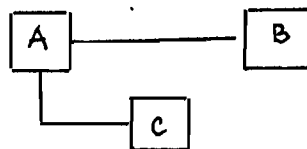
Hubungan ruang:



Keterangan:

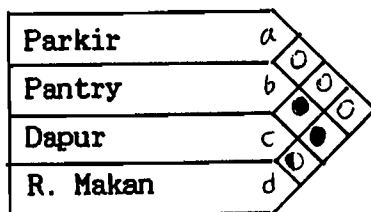
- : Hubungan erat
- ⦿ : Hubungan tidak erat
- : Tidak ada hubungan

Organisasi ruang :



3) Kantin

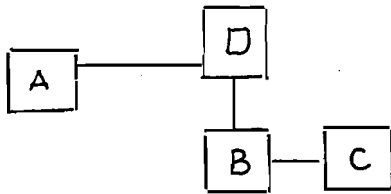
Hubungan ruang:



Keterangan:

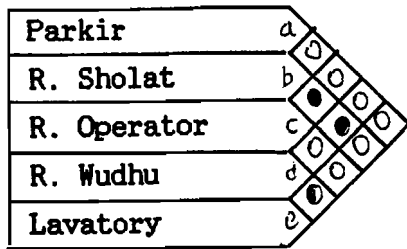
- : Hubungan erat
- ⦿ : Hubungan tidak erat
- : Tidak ada hubungan

Organisasi ruang:



4) Mushala:

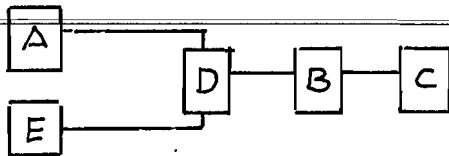
Hubungan ruang:



Keterangan:

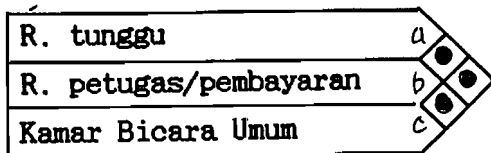
- : Hubungan erat
- ◐ : Hubungan tidak erat
- : Tidak ada hubungan

Organisasi ruang:



5) Warpostel

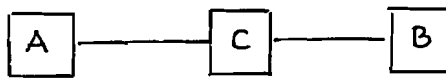
Hubungan ruang:



Keterangan:

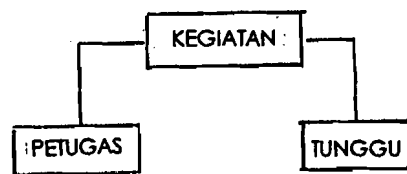
- : Hubungan erat
- ◐ : Hubungan tidak erat
- : Tidak ada hubungan

Organisasi ruang :



6) Ruang lain:

Yaitu Kantor informasi pariwisata, Bank, Toko souvenir, berupa satu ruangan, yang berisi sekaligus tempat tunggu, meja petugas dan tempat sesuai kegiatan masing-masing ruang.



5. Persyaratan Ruang

Persyaratan ruang yang dibutuhkan untuk perancangan dianalisa melalui jenis ruang dan tuntutan yang harus dipenuhinya agar ruang dapat menjalankan fungsinya.

Tabel 3.3. berikut berisi uraian tuntutan ruang menurut jenis ruang yang menghasilkan persyaratan ruang.

Tabel 3.3. Persyaratan Ruang yang Dapat Memenuhi Tuntutan Jenis Ruang

JENIS RUANG	TUNTUTAN	PERSYARATAN
Kantor	-Hubungan yang mudah dengan ruang lainnya	-bukaan sebagai penghubung, jarak antar kantor tidak jauh
Kantor Koordinator	-view bebas -dekat dengan r. Instansi PPLB -bukan ruang yang termasuk urutan Instansi pemeriksaan	-bukaan lebar, letak ruang tinggi -ada sarana penghubung -dapat diletakkan di lantai 2
Jalur/ruang pemeriksaan	-view bebas -hubungan yang mudah dengan r. pemeriksa/ kantor administrasi -lega -bebas polusi	-dinding pembatas semu/ transparan -skala ruang besar sesuai dengan modul pelaku terbesar -bukaan yang besar untuk penyegaran udara alami
R. tunggu	-view bebas -lega -rekreatif, dinamis	-dinding pembatas semu/ transparan -skala ruang besar -plafon, dinding, lantai, bertekstur dan berpola dinamis
R. Informasi	-mudah berkomunikasi	-dinding pembatas terbuka untuk berkomunikasi
Kios cinderamata	-mengundang/terbuka -rekreatif, dinamis, menarik	-dinding pembatas terbuka pada satu sisi, dan atau sebanyak mungkin dinding transparan -dinding, lantai, plafon berpola dinamis dan menarik
R. Istirahat/kantin	-view yang teluasa -lega -rekreatif, dinamis	-sedapat mungkin dinding transparan -skala ruang cukup besar -dinding, plafon atau lantai berpola dinamis, ringan dan tidak masif.

BAB IV KESIMPULAN

Dengan perkembangan fungsi PPLB yang semula hanya melayani pemeriksaan pelintas batas tradisional, menjadi pintu lalulintas internasional, pelayanan berkembang melayani pelintas batas non tradisional. Jadi, jenis pelaku pada PPLB tersebut bertambah. Pelintas batas non tradisional ini termasuk pula jenis pelintas batas orang, barang dan kendaraan.

Pertambahan jenis pelaku mengakibatkan pertambahan jenis kegiatan yang pada gilirannya berakibat pada pertambahan kebutuhan akan wadah. Wadah kegiatan ini dapat berupa ruang.

Dengan membandingkan fasilitas yang telah ada di PPLB, dengan kebutuhan akan ruang/fasilitas untuk mewadahi semua kegiatan yang berlangsung, akan terlihat kebutuhan fasilitas yang belum terpenuhi. Analisa dengan jalan perbandingan tersebut menunjukkan fasilitas tambahan yang perlu dibangun adalah:

1. Tempat pemusnahan
2. Laboratorium
3. R. Departemen Perhubungan
4. R. Satlantas
5. Sirkulasi pengangkut barang
6. Ruang tunggu pengangkut barang
7. Ruang tunggu penjemput/pengantar pelintas batas
8. Warpostel

9. Ruang Dinas Pajak

10. Ruang informasi Pariwisata

11. Toko Cenderamata

Dengan banyaknya jenis pelaku, jenis kegiatan dan jenis ruang pada suatu wadah, tetap harus dikelompokkan agar kegiatan yang ada dapat berjalan baik dan tidak saling tumpang tindih. Pengelompokan dapat dengan berbagai macam cara. Pada PPLB ini, pengelompokan kegiatan (pada akhirnya akan berpengaruh pula terhadap pengelompokan ruang) adalah berdasarkan jenis kegiatan dan waktu relatif yang digunakan pada setiap kegiatan.

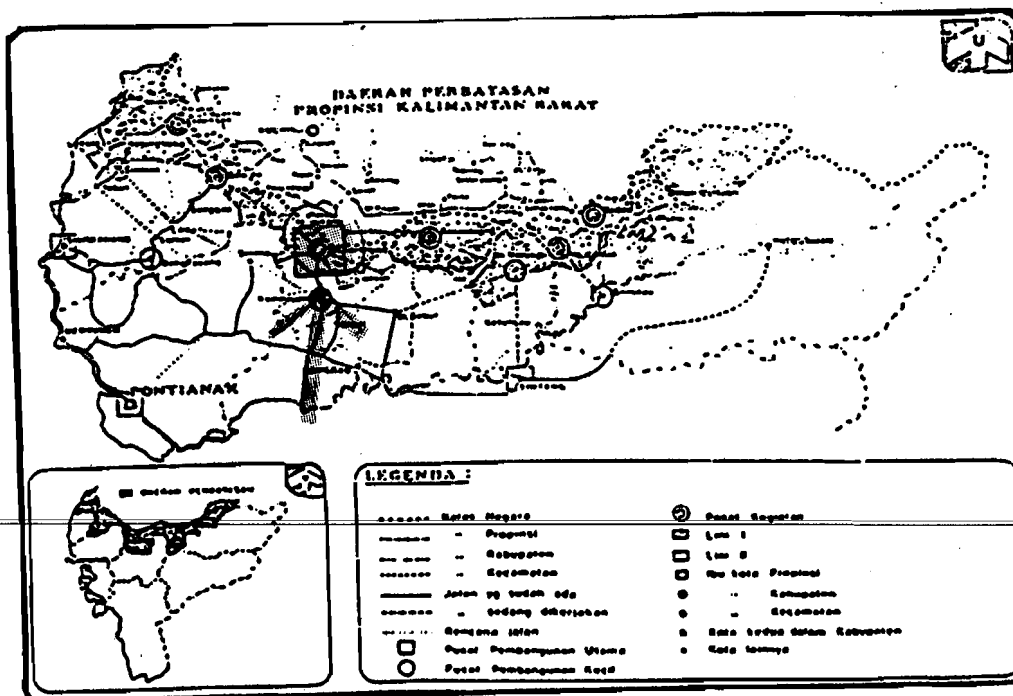
Setelah menganalisa kebutuhan ruangan dengan berdasar pada perhitungan jumlah pelaku PPLB, didapat besaran masing-masing ruangan. Jika dibandingkan dengan keadaan ruang-ruang PPLB (tergambar pada Bab II), terlihat bahwa besaran ruang-ruang utama tidak dapat menampung jumlah pelaku yang harus diwadahnya. Sehingga PPLB perlu ditata ulang dan dibangun kembali dengan perencanaan dan perancangan sesuai dengan analisa dan perhitungan jumlah pelaku PPLB.

BAB V KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

A. KONSEP PERENCANAAN

1. Lokasi dan Site

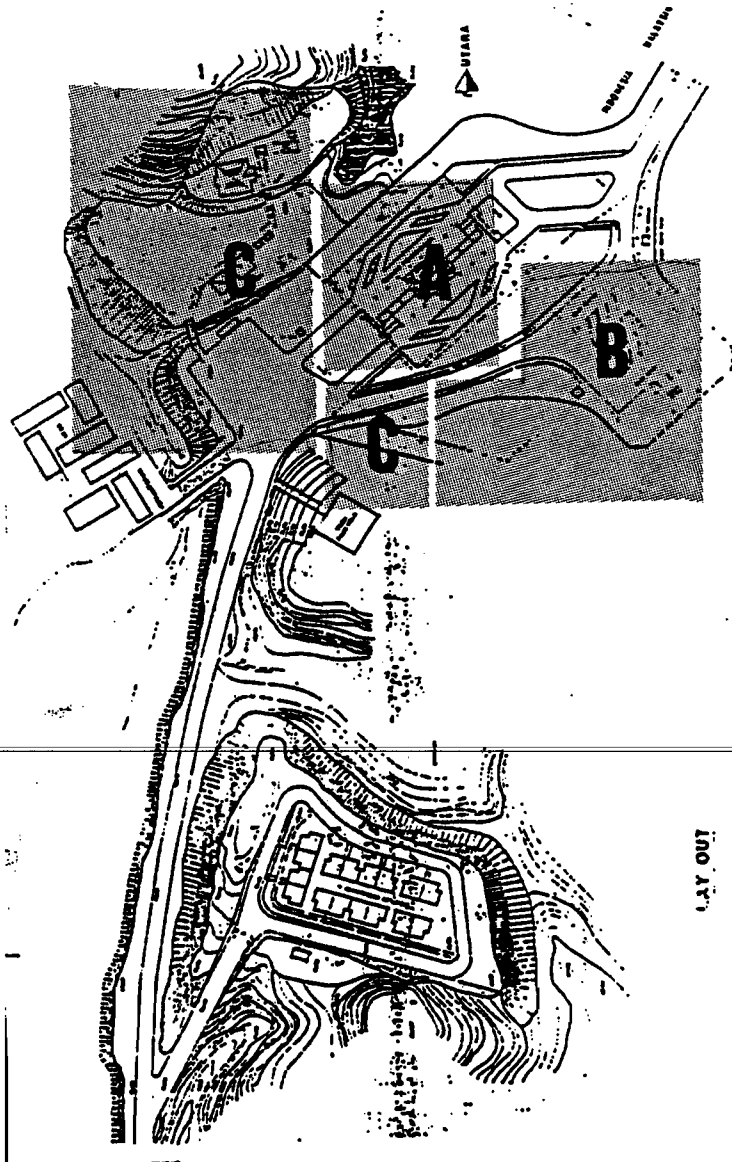
Lokasi dan site PPLB terletak diujung poros jalan Kalimantan Barat-Sarawak bagian Indonesia, tiga kilometer dari Dusun Entikong.



Gb. 5.1. Konsep Lokasi dan Site PPLB

2. Penzoningan

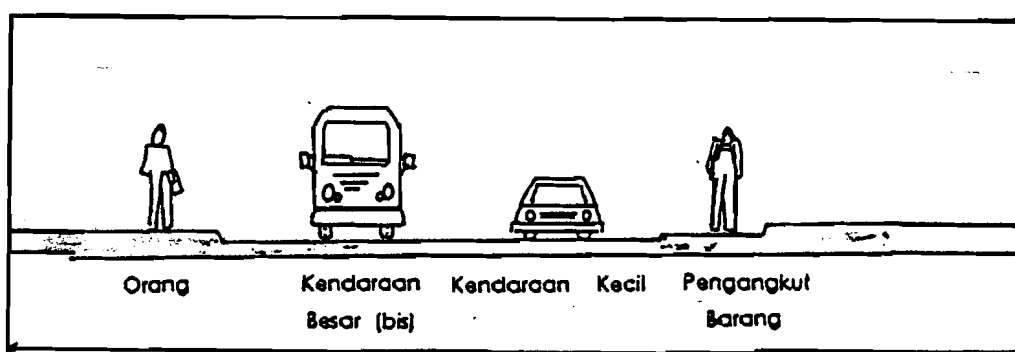
- a. Zone Kegiatan Utama
- b. Zone kegiatan Penunjang
- c. Zone kegiatan Tambahan



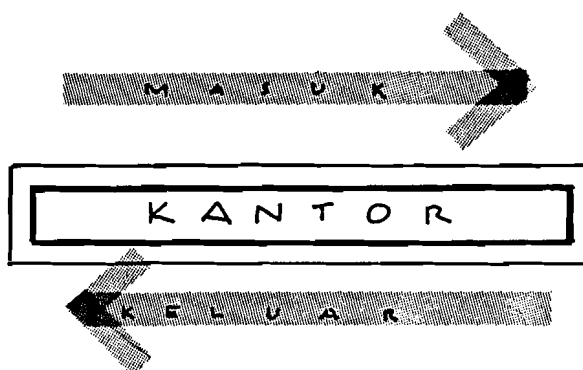
Gb. 5.2. Konsep Penzoningan di PPLB

3. Sirkulasi dan Pencapaian

- a. Sirkulasi berbentuk aliran lurus di gedung utama (kegiatan pemeriksaan).
- b. Ada pemisahan sirkulasi menurut pelintas batas di gedung utama, dan terbagi lagi dalam beberapa jalur menurut jumlah petugas pemeriksa. Bagi pemeriksaan bea cukai ada *green line* dan *red line*.

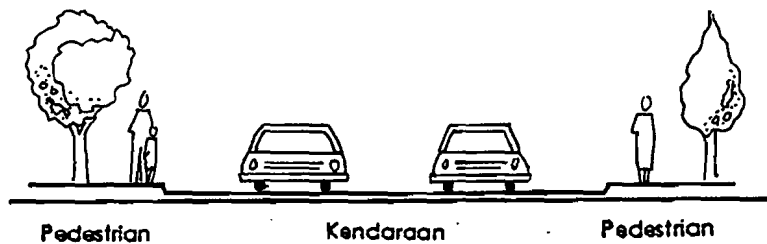


- c. Ada lintasan balik dan ruang tunggu bagi pelintas batas yang tidak memenuhi syarat.
- d. Untuk pemeriksaan barang ekspor dan impor dalam jumlah besar, ada jalur tersendiri.
- e. Ada dua sirkulasi utama : sirkulasi pemeriksaan masuk wilayah dan sirkulasi pemeriksaan keluar wilayah.



f. Ada tanda sebagai pintu masuk kawasan.

g. Pemisahan jalur pedestrian dan kendaraan



B. KONSEP PERANCANGAN

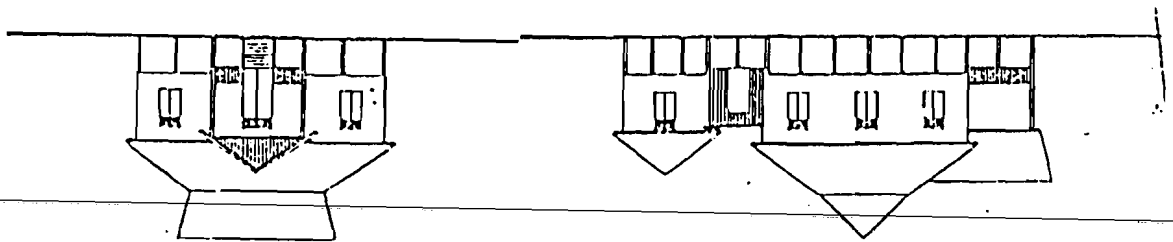
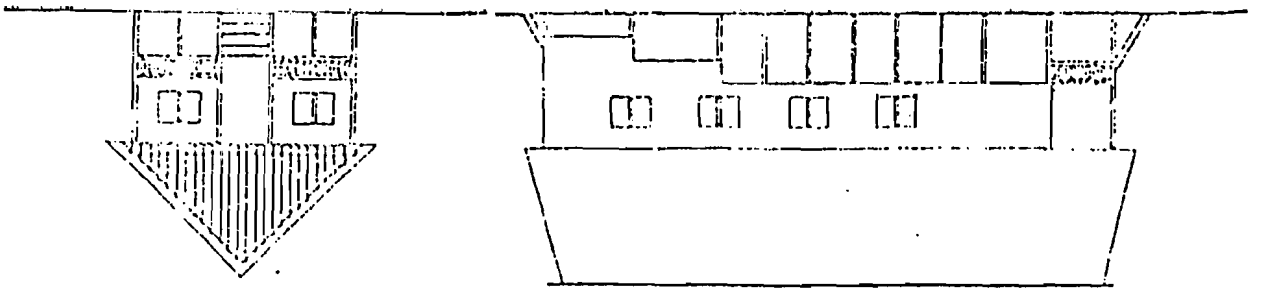
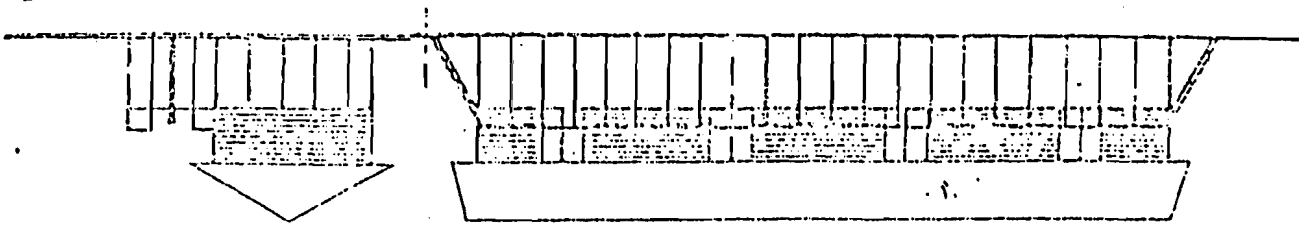
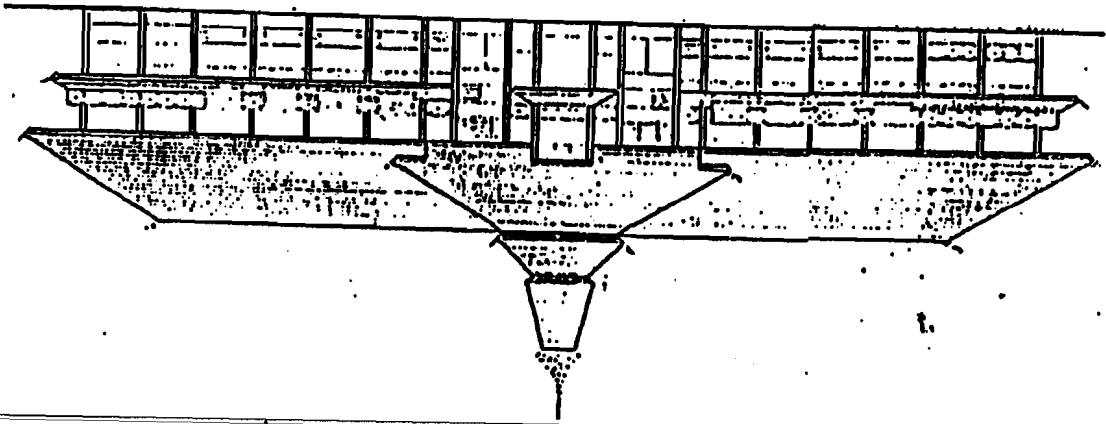
1. Penampilan Bangunan

Bukaan-bukaan lebar diterapkan pada bangunan utama untuk memasukkan penghawaan alami sebanyak mungkin, mengatasi faktor polusi. Dimensi ketinggian bangunan memungkinkan bis-bis besar leluasa untuk lewat/melakukan pergerakan didalamnya (ketinggian bis 3m).

Pada bangunan lainnya (bangunan kegiatan tambahan) dibutuhkan dinding transparan sehingga para pelaku didalamnya mempunyai view ke arah luar atau ke dalam dengan leluasa.

Unsur-unsur arsitektur setempat dapat diterapkan bagi bangunan yang sesuai, pertimbangannya adalah peran PPLB sebagai pintu gerbang memasuki wilayah Indonesia umumnya dan Kalimantan barat khususnya, dan sebagai identitas wilayah.

Gambar berikut adalah bentuk-bentuk arsitektur daerah Kalimantan Barat, serta perancangan yang dijadikan *guideline* bagi bangunan di Kalimantan Barat:



2. Kebutuhan Ruang

a. Pemeriksaan lalulintas internasional

- 1) R. Pemeriksaan Bea Cukai
- 2) R. Pemeriksaan Imigrasi
- 3) R. Pemeriksaan Karantina
- 4) R. Pemeriksaan Departemen Perhubungan
- 5) R. Pemeriksaan Asuransi
- 6) R. Pemeriksaan Satlantas
- 7) R. Pemeriksaan Karantina SDA
- 8) R. Pemeriksaan Laboratorium
- 9) R. Rapat Koordinasi
- 10) R. Instansi Pajak

b. Melintas batas

- Jalur sirkulasi

c. Mengantar/menjemput pelintas batas

- R. Tunggu

d. Usaha Jasa

1) Jalur sirkulasi pengangkut barang

- 2) R. Tunggu pengangkut barang
- 3) Toko Cinderamata
- 4) Warpostel
- 5) Bank

e. Istirahat dan kebutuhan lain

- 1) Kantin
- 2) Lavatory
- 3) R. Ibadah

4. Pengelompokan Ruang

a. R. Kegiatan utama

- 1) R. Bea Cukai
- 2) R. Imigrasi
- 3) R. Karantina
- 4) R. Departemen Perhubungan
- 5) R. Asuransi
- 6) R. Satlantas
- 7) R. Karantina SDA

b. R. Kegiatan Penunjang

- 1) R. Laboratorium
- 2) R. Rapat Koordinasi
- 3) R. Intansi Pajak

c. R. Kegiatan Tambahan

- 1) R. Istirahat
- 2) R. Informasi
- 3) R. Komunikasi
- 4) R. Ibadah

- 5) Bank

5. Persyaratan Ruang

a. Ruang Utama

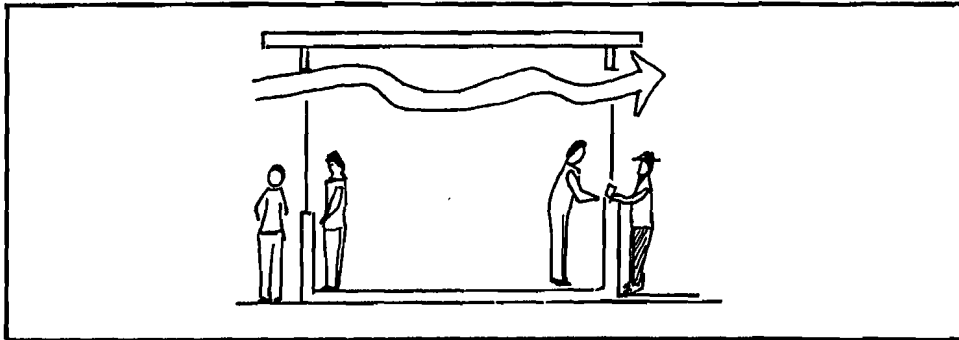
- 1) R. Bea dan Cukai
- 2) R. Imigrasi
- 3) R. Karantina
- 4) R. Departemen Perhubungan

5) R. Asuransi

6) R. Satlantas

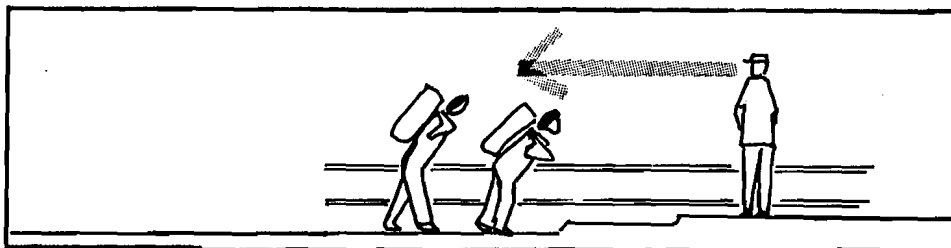
7) R. Karantina SDA

- Bukaannya pada sisi sirkulasi masuk wilayah dan sirkulasi keluar wilayah untuk berkomunikasi dengan pelintas batas, bukannya sisi lain untuk berhubungan dengan instansi lain.
- Pencahayaan alamiah yang cukup untuk kegiatan administrasi.
- Penghawaan alami yang cukup karena dekat dengan sirkulasi kendaraan yang mengandung unsur polusi tinggi.

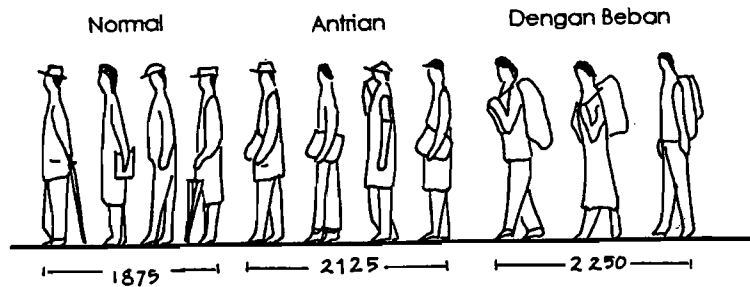


8) Sirkulasi pelintas batas dan pengangkut barang

- Terbuka, memungkinkan view yang leluasa.
- Sebanyak mungkin memasukkan penghawaan alami, karena tingginya faktor polusi.
- Pencahayaan sebanyak mungkin.

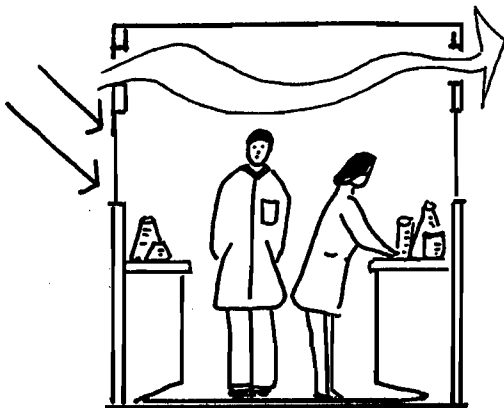


- Ruang luas, memberikan keleluasaan gerak.



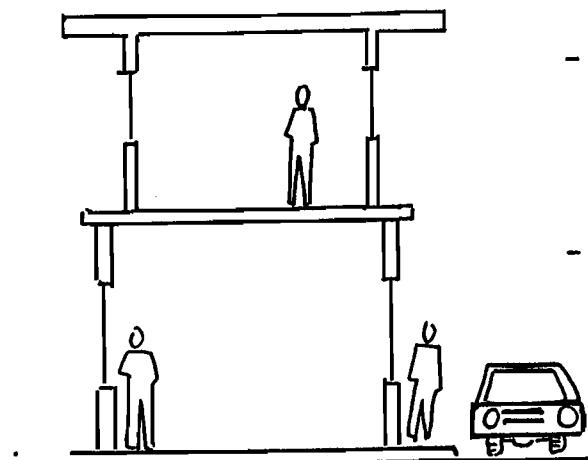
b. R. Kegiatan Penunjang

1) R. Laboratorium



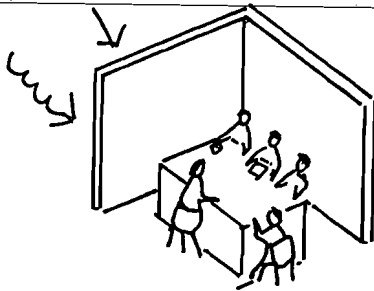
- Pencahayaan langsung namun dengan penurunan kadar panas dan penghawaan alami yang banyak untuk kegiatan penelitian.
- Ruang membutuhkan privacy tinggi

2) R. Kantor Koordinator



- View yang cukup untuk mengawasi kegiatan.
- Cukup dekat dengan instansi PPLB, namun tidak termasuk dalam urutan ruang instansi
- Perletakan di lantai 2 mengatasi kedekatan hubungan namun tidak mengganggu/ memutus proses urutan kegiatan.

3) R. Rapat Koordinasi

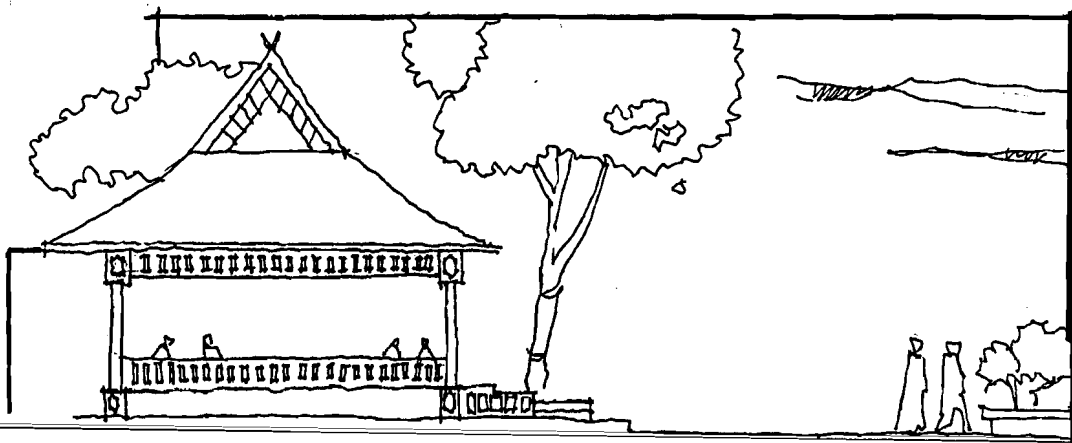


- Ruang membutuhkan privacy tinggi.
- Terhindar dari unsur-unsur kebisingan

c. R. Kegiatan Tambahan

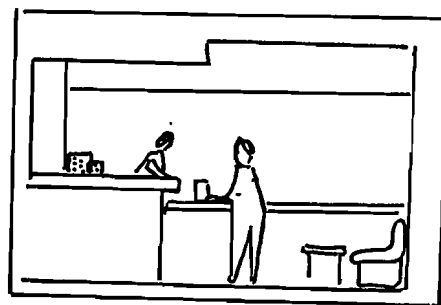
1) Kantin

- Bukaan lebar sehingga view leluasa dan penghawaan alami masuk, mengatasi rasa kejenuhan.
- Ruang leluasa untuk bersantai dan beristirahat.



2) R. Informasi

- Bukaan yang besar bersifat mengundang dan terbuka
- Suasana lugas, tidak membingungkan.



3) Bank

- Bukaan tidak terlalu lebar menjamin privacy pelaku

3) R. Komunikasi

- ~~Bukaan tidak terlalu lebar menghindarkan suara-suara bis-~~
sing dari luar.
- Ruang kedap suara, menjamin pembicaraan tidak terganggu suara keras.

4) R. Ibadah

- Bersifat tenang, menghindarkan masuknya unsur-unsur bising.
- Lokasi bangunan tidak tercampur dengan unsur-unsur keramaian.

5) R. Tunggu pengangkut barang

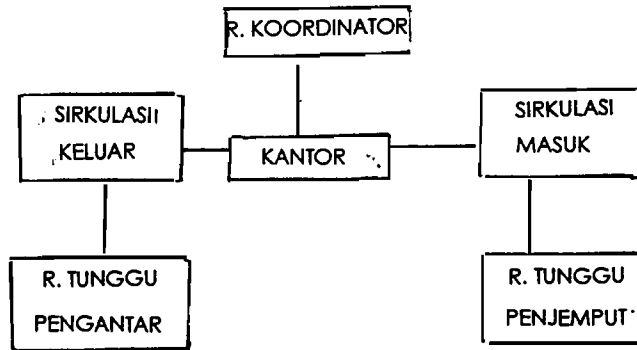
- Pandangan leluasa keluar untuk melihat pemberi tugas
- Dekat dengan sirkulasi kedatangan pemberi tugas.

6) R. Tunggu pengantar/penjemput

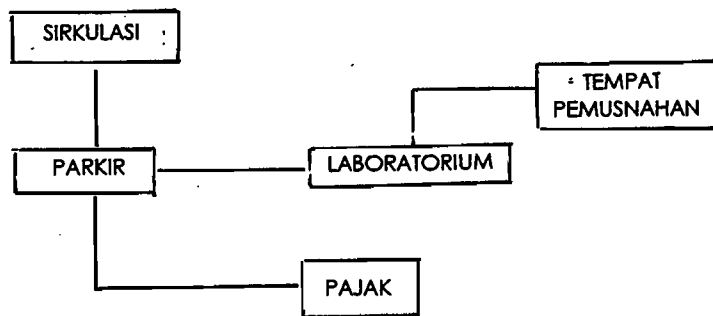
- Pandangan leluasa kearah kedatangan dan keberangkatan.
 - Hubungan yang erat dengan tempat kedatangan dan keberangkatan.
 - R. Pengantar/penjemput mempunyai alternatif menjadi satu dengan bangunan utama, atau menempati bangunan tersendiri yang mempunyai kemudahan akses kearah kedatangan dan keberangkatan.
-

6. Organisasi Ruang

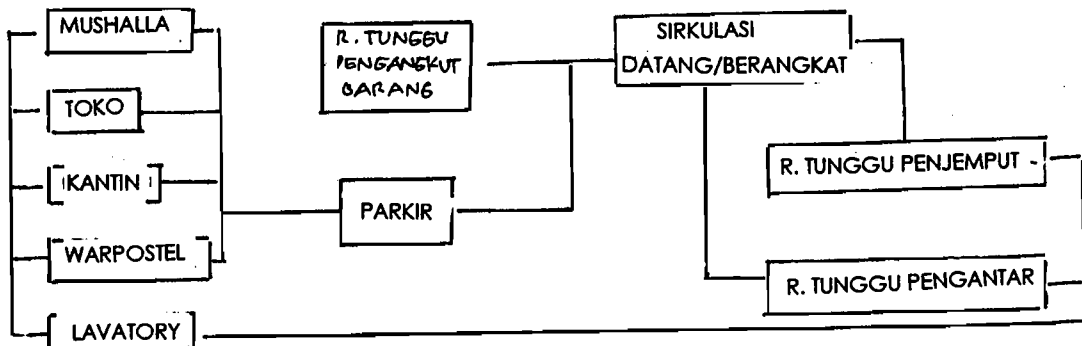
a. Bangunan Utama :



b. Bangunan kegiatan penunjang



c. Bangunan kegiatan tambahan :



7. Besaran Ruang

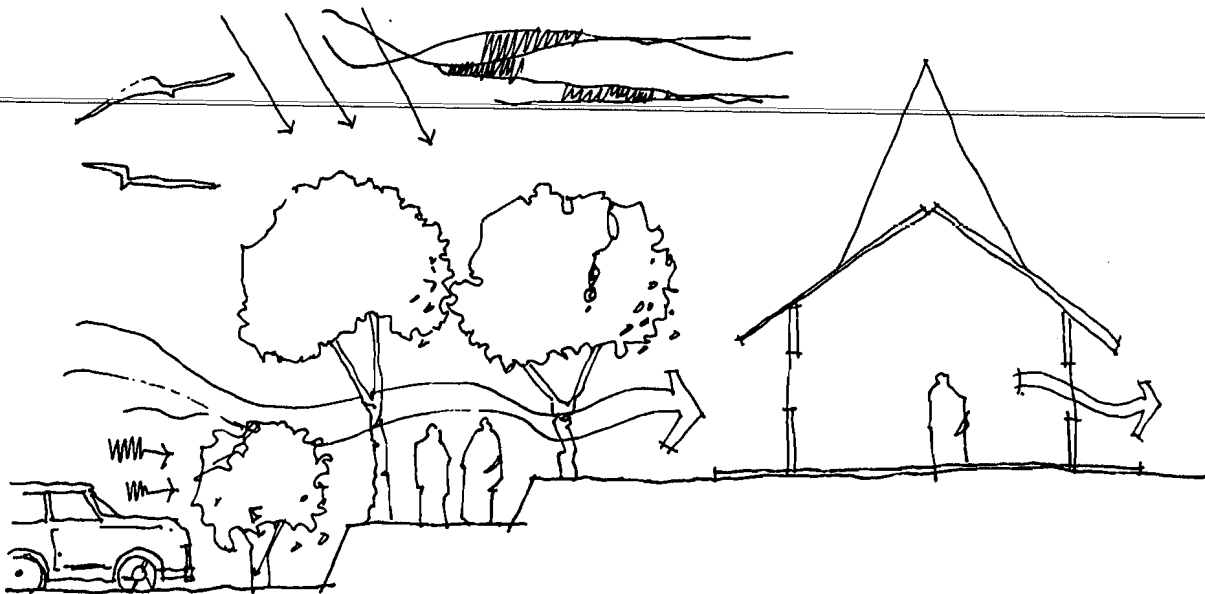
- Ruang petugas Bea dan Cukai, Imigrasi, Karantina, Asuransi..	270m ²
- Ruang petugas instansi Pajak.....	33m ²
- Ruang petugas Satlantas, Departemen Perhubungan.....	24m ²
- Petugas pemeriksa 2 sisi.....	48m ²
- Lebar ruang sirkulasi 2 kendaraan bis.....	10m ²
- Lebar ruang sirkulasi kendaraan kecil.....	8m ²
- Lebar ruang sirkulasi 10 orang.....	10m ²
- Laboratorium.....	62,5m ²
- Kantor Koordinator PPLB.....	25m ²
- R. Rapat kecil.....	72m ²
- R. Rapat besar.....	240m ²
- Ruang Sekretaris.....	10m ²
- Ruang tunggu orang.....	149,04m ²
- Ruang tunggu kendaraan (parkir).....	105m 25m ²
- Halte bis.....	27m ²
- Ruang tunggu halte bis.....	25,92m ²
- Ruang tunggu pengangkut barang.....	21,6m ²
- Ruang tunggu bis.....	140m ²
- Kantin.....	250,6m ²
- Pantry kantin.....	15m ²
- Toko souvenir.....	89,48m ²
- Warpostel.....	16,32m ²
- Kantor Informasi Pariwisata.....	11,52m ²
- Mushala.....	61,88m ²
- Ruang wudhu.....	6,3m ²

- lavatory mushala.....	4,5m ²
- Lavatory per unit.....	10,44m ²
- Bank.....	11,52m ²

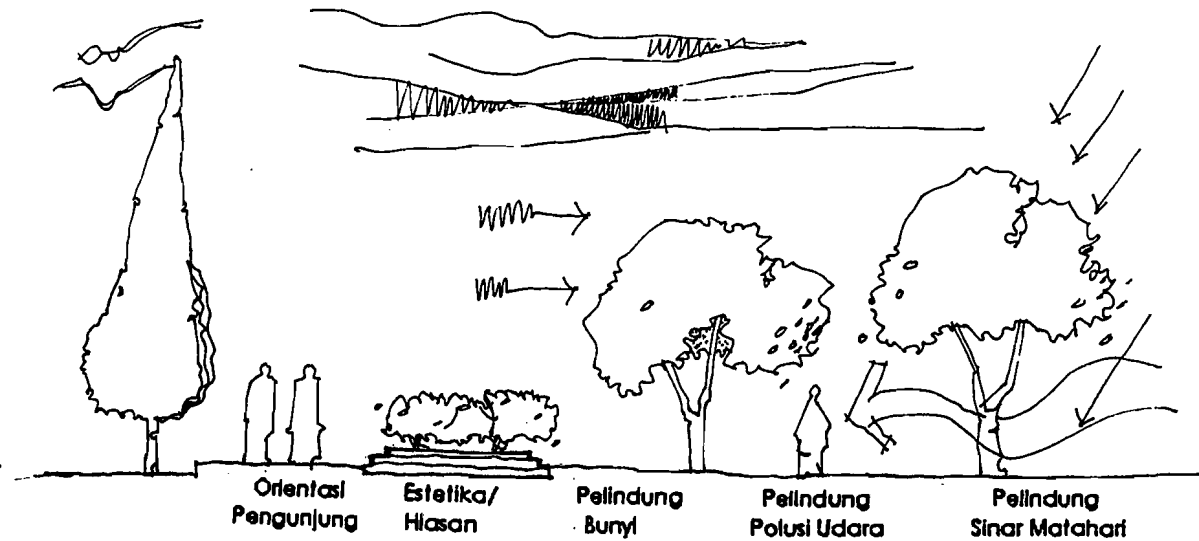
8. Pola Vegetasi

Vegetasi merupakan elemen lingkungan yang terpenting, bukan hanya sebagai elemen estetika saja, namun berperan pula sebagai orientasi, pelindung, pembentuk suasana iklim mikro, dan lain-lain. Untuk itu konsep perancangan pola vegetasi pada kawasan PPLB adalah:

- a. Menciptakan arah/orientasi dari entrance ke bangunan.
- b. Mendukung suasana/kegiatan yang ada di kawasan, yaitu sebagai peneduh.
- c. Melindungi bangunan terhadap sumber polusi.
- d. Sebagai pelindung bangunan dan menciptakan iklim mikro yang nyaman dari sinar matahari.



Sedangkan jenis dan macam vegetasi yang dipakai mengikuti fungsi/tujuan yang ingin dicapai:



9. Konsep Dasar Teknis

a. Sistem Struktur

Disesuaikan dengan tuntutan bentuk bangunan dan usaha integrasi dengan lingkungan alam serta persyaratan kekuatan. Untuk itu bisa digunakan sistem struktur rangka atau sistem struktur bidang. Sistem pondasi yang digunakan adalah pondasi tapak, pondasi menerus dan pondasi bidang.

b. Penilaian Bahan

- 1) Bahan Struktur: yang dipilih adalah beton, dengan pertimbangan kuat menahan gaya (baik oleh angin maupun menahan berat bangunan itu sendiri), cocok untuk struktur rangka.
- 2) Bahan Konstruksi dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal dan pemanfaatan bahan-bahan alami seperti kayu, beton dan sebagainya.

c. Utilitas

- 1) Air bersih: kebutuhan air bersih dilayani dengan memanfaatkan air tanah. Sistem distribusi dengan memompa air tanah ke atas dan ditampung dalam bak penampungan, kemudian didistribusikan merata pada bagian-bagian yang membutuhkan.
- 2) Air Kotor: sistem pembuangan air kotor dengan septictank dan sumur peresapan. Air kotor yang berasal dari beberapa bangunan ditampung dalam satu septictank, kemudian beberapa septictank dialirkan kedalam sumur peresapan.
- 3) Drainase/saluran air hujan: dengan penyaluran langsung ke laut, dengan memakai saluran atau tanpa saluran.
- 4) Pembuangan Sampah
 - Dengan penyediaan tempat-tempat sampah yang mencukupi dan diletakkan menyebar pada area PPLB, tempat strategis dan mudah terlihat.
 - Sampah-sampah dari tempat sampah tersebut akan dikumpulkan petugas dan dibuang ke bak sampah lingkungan. Bak sampah lingkungan harus mudah dijangkau oleh truk sampah.
 - Kemudian sampah tersebut diangkut truk sampah untuk dibuang ke lokasi pembuangan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew D. Seidel and Scott Danford. Environmental Design: Research, Theory, and Application. New York. May. 1979.
- Bappeda Propinsi Tk I Kalimantan Barat. Program Pembangunan Daerah Perbatasan Kalimantan Barat 1984/1985 - 1988/1989.
- David Canter. Psychology for Architects. Applied Science Publishers Ltd. London. 1974.
- Ernst Neufert. Terjemahan Sjamsu Amril. Data Arsitek Jilid I. Airlangga. Jakarta. 1990.
- Ernst Neufert. Terjemahan Sjamsu Amril. Data Arsitek Jilid II. Airlangga. Jakarta, 1990.
- Geoffrey Broadbent. Design In Architecture, Architecture And The Human Science. The Gresham Press, England, April, 1990.
- Ichsani A.S. Kertas Kerja Perorangan Analisis Kasus Tentang Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong Propinsi Kalimantan Barat. 1993.
- Jon Lang. Designing for Human Behavior: Architecture and the Behavioral Sciences. Dowden, Hutchinson & Ross, Inc. Stroudsburg, Pennsylvania, 1974.
- Kata Sambutan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Dalam Peresmian Pembukaan Pertemuan Ke 11 KK/JKK SOSEK MALINDO
- Pemda Tk I Propinsi Kalimantan Barat. Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat. Fakta Dan Analisis. Januari 1994

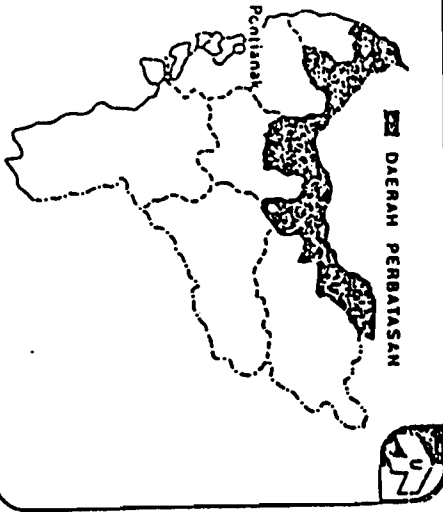
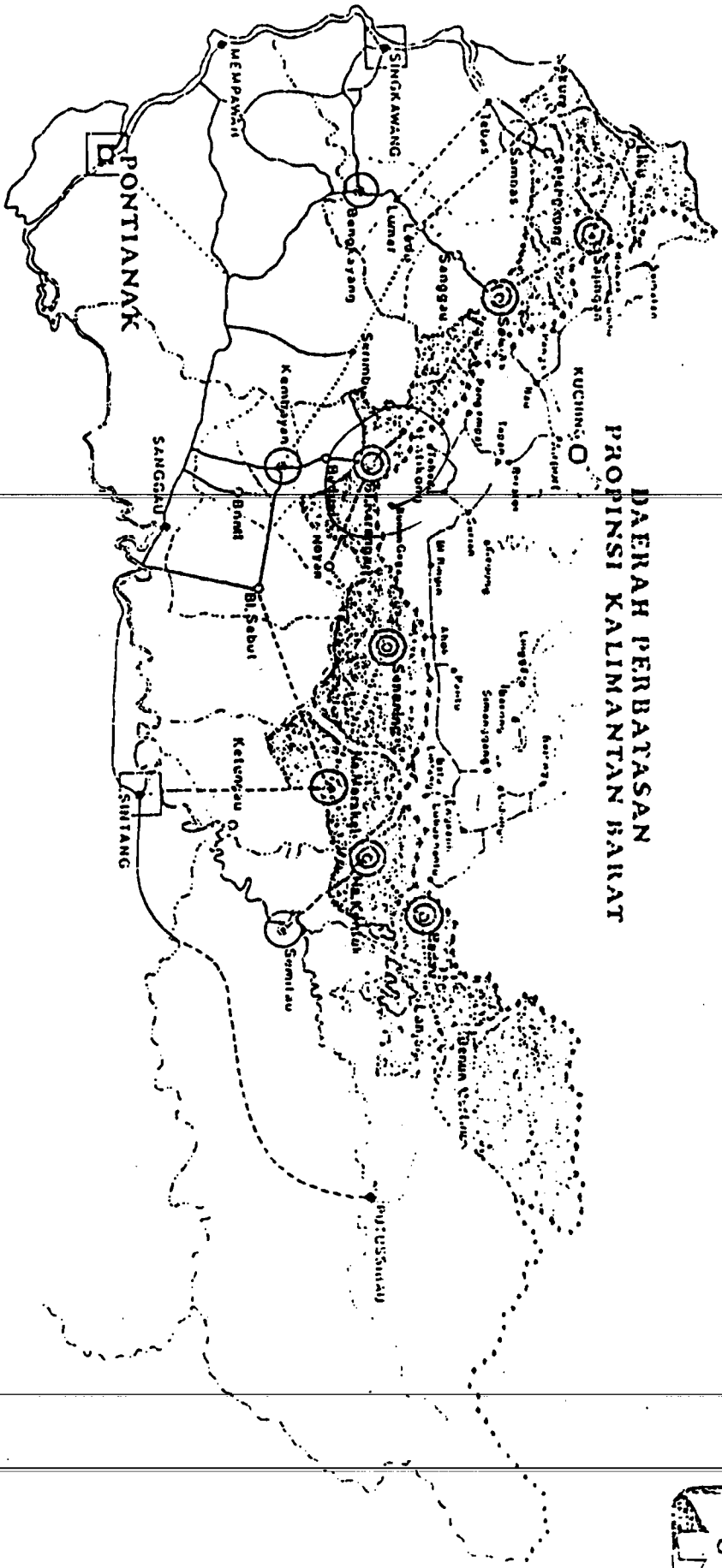
Penda Tk I Propinsi Kalimantan Barat. Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat. Rencana. Maret 1994

Sekretariat KK Sosek Indonesia. Pembangunan Sosio Ekonomi Wilayah Perbatasan Indonesia Malaysia (Penyambungan Jalan Raya Entikong Tebedu) Di Daerah Perbatasan Kalimantan Barat Dengan Tebedu Di Sarawak. Jakarta 1991

Tim Peneliti Universitas Tanjungpura Pontianak. Bahan Seminar Hasil Penelitian Arsitektur Lingkungan dan Identitas Penemuan Kembali Arsitektur Khas Kalimantan Barat. Pontianak. Juli. 1994



DAERAH PERBATASAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT



LEGENDA :

- | | | | |
|-------|-------------------------|---|----------------------------|
| ----- | Batas Negara | ⊙ | Pusat Kegiatan |
| ----- | .. Propinsi | ⊠ | Lini I |
| ----- | .. Kabupaten | ⊡ | Lini II |
| ----- | .. Kecamatan | ⊞ | Ibu kota Propinsi |
| ----- | Jalan yg sudah ada | ⊕ | .. Kabupaten |
| ----- | .. sedang dikerjakan | ○ | .. Kecamatan |
| | Rencana jalan | ⊙ | Kota kedua dalam Kabupaten |
| □ | Pusat Pembangunan Utama | ● | Kota lainnya |
| ○ | Pusat Pembangunan Kecil | | |

Table 2.1—Interrelations in building design. The author's conceptual model in which three major systems—human, building and environment-as-a-system—are interrelated. The human system wishes to perform certain activities at a particular place; if the environment at that place is incompatible with those activities then a building is designed as a system for reconciling the two

ENVIRONMENT SYSTEM		BUILDING SYSTEM		HUMAN SYSTEM	
CULTURAL CONTEXT	PHYSICAL CONTEXT	BUILDING TECHNOLOGY	INTERNAL AMBIENCE	USER REQUIREMENTS	CLIENT OBJECTIVES
	The site as given in terms of:	Modifications of external environment to provide suitable ambience for specified activities by means of:	Provision of physical conditions for performance of activities in terms of:	Provide for specified activities in terms of the following needs:	Return for investment in terms of:
Social Political Economic Scientific Technological Historical Aesthetic Religious	<i>Physical characteristics:</i> climatic geological topographical <i>Other constraints:</i> land use existing built forms traffic patterns legal	<i>Available resources in terms of:</i> cash materials labour/equipment <i>Structural systems:</i> mass planar frame <i>Space separating system:</i> mass planar frame <i>Services system:</i> environmental information transportation <i>Fitting system:</i> furnishing equipment	<i>Structural mass:</i> visible surfaces space enclosed <i>Sensory environment:</i> lighting sound control heating/vent	<i>Organic:</i> hunger and thirst respiration elimination activity rest <i>Spatial:</i> functional (inc. fittings) territorial <i>Locational:</i> static dynamic <i>Sensory:</i> sight hearing heat and cold smell kinaesthetic equilibrium <i>Social:</i> privacy contact	Security Prestige Profit Expansion or other provision for change Housing of particular activities so as to encourage user well-being, motivation, etc.

(G. H. Broadbent, adapted from T. L. Markus: Building-Environment-Activity-Objectives model)